

**TAHUN
2023**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Jl. R.M. Nur Atmadibrata No.01 Telanaipura Jambi

Telp. (0741) 669352 Fax (0741) 669352 Website : www.litbang.jambi.prov.go.id

Email : balitbangdajambi1@gmail.com: balitbangdajbiup@gmail.com

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian LKjIP Tahun 2023 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, Desember 2023

Kepala Badan,



Dr. Hj. Sri Argunaini, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660722 199303 2 004

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Revisi Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Nilai AKIP dengan anggaran sebesar Rp. 8.519.624.525,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.414.601.515,- (95,94%). Capaian kinerja Tahun 2023 Tdengan Nilai AKIP turun dari tahun 2022 menjadi 66,35 dari dengan Predikat B.
2. Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.230.801.828,- dengan realisasi sebesar Rp. 1225.736.401,- (99,42%). Capaian kinerja Tahun 2023 100% dari 65% yang ditargetkan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Balitbangda Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan.
2. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai tahun berjalan.
3. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
4. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi LkjIP dalam hal penyajian informasi tentang analisis efesiensi penggunaan sumber daya
5. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.
6. Meningkatkan koodinasi dan komunikasi yang intens dengan Inspektorat Dearah Provinsi Jambi untuk peningkatan kualitas SAKIP Balitbangda Provinsi Jambi.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam LKjIP ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Balitbangaa Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	14
1.4 Keadaan Pegawai.....	15
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	17
1.6 Keuangan	18
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
2.1 Perencanaan Strategis.....	21
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	21
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	25
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan.....	29
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	31
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023.....	31
2.3.1 Target Belanja Balitbangda Provinsi Jambi.....	32
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	32
2.4 Instrumen Pendukung.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	34
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	35
3.3. Bentuk Penyajian Data Kinerja	52
3.4. Realisasi Anggaran.....	54
3.5. Analisis Efisiensi.....	79
BABIV PENUTUP.....	82
LAMPIRAN	58
Lampiran 1 Perjanjian KinerjaTahun 2023	
Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023	
Lampiran 3 Penghargaan yang diraih Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023	
Lampiran 4 Matriks Renstra 2021-2026	

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2023	16
Tabel 1.2.	Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2023.....	16
Tabel 1.3.	Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2023	17
Tabel 1.4.	Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2023.....	17
Tabel 1.5.	Daftar Sarana dan Prasarana Badan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023	18
Tabel 2.1.	Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026	24
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi.....	27
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategi Balitbangda Provinsi Jambi.	29
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	31
Tabel 2.5.	Target Belanja Balitbangda Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022	32
Tabel 2.6.	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Balitbangda Provinsi Jambi	32
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	34
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023	35
Tabel 3.3.	Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023	35
Tabel 3.4.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023	36
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja 2021-2023	37
Tabel 3.6.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	52
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja 2021-2023	52
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	53
Tabel 3.9.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023	75
Tabel 3.10.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023.....	54
Tabel 3.11.	Analisis Efisiensi Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023	79

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	2
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Fungsi dan Tujuan
- 1.3. Isu-isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup

Pemerintah Provinsi Jambi.

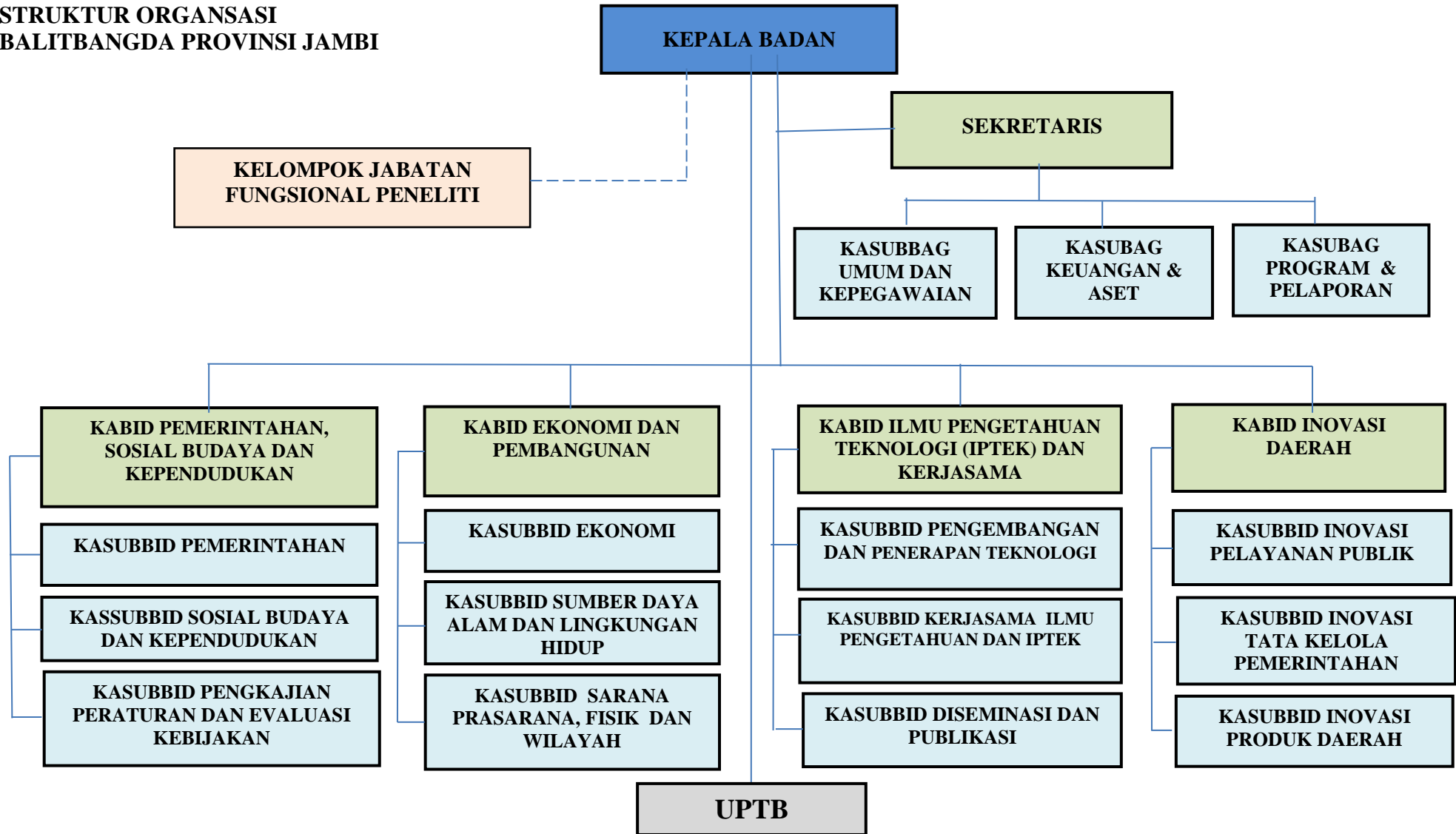
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya LKjIP Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balitbangda Provinsi Jambi;
2. Mendorong Balitbangda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balitbangda Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Balitbangda Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

Balitbangda Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi. Balitbangda Provinsi Jambi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANSASI
BALITBANGDA PROVINSI JAMBI**



Pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 menggunakan struktur Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26 tanggal 10 Januari 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 12 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37 tanggal 14 November 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Jambi Tahun 2023.

1.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping tugas yang diemban tersebut Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- 2) Penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- 3) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- 4) Pembinaan dan fasilitasi penelitian dan pengembangan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbang kab/kota;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi, promosi dan evaluasi inovasi daerah;
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- 7) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada badan;
- 9) Pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitiannya oleh instansi yang berwenang;
- 10) Permintaan laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;
- 11) Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sedangkan tugas dan fungsi masing masing jabatan eselon III pada Balitbangda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran kelitbangan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan anggaran kelitbangan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja kelitbangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumatanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset;
- d. pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
 - pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
 - penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, humas dan keprotokolan;
 - penyiapan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - penyiapan bahan administrasi kepegawaian;
 - penyelenggaraan urusan dokumentasi dan informasi umum dan kepegawaian; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, pengelolaan aset, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan dan aset;
 - pengumpulan data dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran keuangan dan aset;
 - penyiapan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
 - pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan akuntansi;
 - penyusunan laporan keuangan dan aset;
 - pelaksanaan pemeliharaan aset; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya
- Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan penyiapan data bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- pengumpulan bahan dokumen perencanaan dan anggaran meliputi rencana strategis dan rencana kerja badan dan dokumen perencanaan lainnya;
 - pengumpulan bahan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran (RKA) badan;
 - penyiapan bahan koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelitbangan;
 - pengelolaan sistem informasi pelaporan pelaksanaan program kelitbangan di lingkungan badan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;

- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan rekomendasi hasil kelitbangan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di bidang , sosial budaya dan kependudukan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya;

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan terdiri dari :

- Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di subbidang pemerintahan;
 - pelaksanaan kegiatan kelitbangan di subbidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang pemerintahan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang sosial budaya dan kependudukan, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, masyarakat terpencil, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di sub bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;
 - pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;
 - penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;

- penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang Sosial Budaya dan Kependudukan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan sub bidang Pengkajian Peraturan dan evaluasi kebijakan dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan mempunyai fungsi :
- pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
 - pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
 - penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, koordinasi, konsultasi dan evaluasi di Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengaturan untuk penyiapan bahan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. pengaturan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. pelaksanaan penyeliaan penyusunan rekomendasi hasil kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. pelaksanaan penyeliaan administrasi dan tata usaha di Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Subbidang Ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, keuangan daerah, pariwisata dan ekonomi kreatif, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - pengumpulan/pengolahan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di sub bidang Ekonomi;
 - pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Ekonomi;
 - pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di Subbidang Ekonomi;
 - penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Ekonomi;
 - pelaksanaan bimbingan terhadap bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di sub bidang Ekonomi ; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, evaluasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan, koordinasi, konsultasi dan perumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, pertanian, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan bencana alam. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - Pengumpulan/pengolahan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - penyiapan data dan bahan serta fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan Sumber Daya Genetik;

- pelaksanaan bimbingan terhadap bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya .
- Sub Bidang Sarana Prasarana, Fisik dan Wilayah, mempunyai tugas membantu budang dalam rangka melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan, evaluasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan, koordinasi, konsultasi dan perumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di Subbidang sarana prasarana fisik dan wilayah, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, kelistrikan, komunikasi/informatika. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah mempunyai fungsi :
- pengumpulan/pengolahan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi serta konsultasi di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
 - pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
 - pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
 - penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
 - pelaksanaan bimbingan terhadap bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI (IPTEK) DAN KERJASAMA

Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek) dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek) dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan, yang meliputi pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama
- c. penyiapan bahan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang Iptek dan kerjasama;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian/pengkajian, rekayasa di bidang iptek dan kerjasama;
- e. pelaksanaan sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis teknologi informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Iptek dan Kerjasama terdiri dari :

- Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas, sub bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi mempunyai fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan penerapan teknologi;
 - penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan serta penerapan teknologi, meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - pembinaan dan pelaksanaan kelitbangan di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi; aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan fasilitas di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub bidang Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, evaluasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelaksanaan kerjasama kelitbangan serta

fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pelaksanaan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pembinaan, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub bidang Diseminasi dan Publikasi, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan-bahan sosialisasi, promosi iptek ,diseminasi, dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Diseminasi dan Publikasi mempunyai fungsi :
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang Diseminasi dan publikasi meliputi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
 - pelaksanaan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Diseminasi dan Publikasi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi;
 - pelaksanaan sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi ;
 - pelaksanaan pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang Diseminasi dan Publikasi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di sub bidang Diseminasi dan Publikasi meliputi aspek-aspek sosialisasi,

promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG INOVASI DAERAH

Bidang Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu badan dalam rangka melaksanakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Inovasi Daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan, strategi dan penerapan pengembangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- d. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersilat inovatif;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Inovasi Daerah terdiri dari :

- Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Pelayanan Publik mempunyai fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - pelaksanaan evaluasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Pelayanan Publik;

- pelaksanaan pengawasan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur, dan metode tata kelola pemerintahan daerah yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan mempunyai fungsi :
- penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
 - pelaksanaan fasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Inovasi Produk Daerah, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur dan metode pengembangan Produk Daerah yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Produk Daerah mempunyai fungsi :
- penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Produk Daerah;
 - pelaksanaan fasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Produk Daerah;
 - penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode pengembangan produk daerah yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Produk Daerah;

- pelaksanaan pengawasan kegiatan kelitbang daerah di Sub Bidang Inovasi Produk Daerah;
- penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Produk Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

Balitbangda Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Balitbangda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan yang selalu berubah.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup OPD lingkun Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Kelitbang Kabupaten/Kota serta *stakeholder*. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah peraturan perundangan yang selalu berganti.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Balitbangda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balitbangda Provinsi Jambi selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

Berdasarkan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi yang berkaitan dengan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, ada beberapa hal penting yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan seperti yang tertuang dalam program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya kemitraan/jejaring penelitian dan penerapan Iptek.
3. Belum optimalnya pemanfaatan ekosistem inovasi sebagai budaya baru di kalangan Pemerintah, Masyarakat, Akademisi dan Pelaku Usaha dalam upaya peningkatan kinerja inovasi di daerah.
4. Belum optimalnya implementasi Iptek bagi pembangunan di daerah.
5. Meningkatkan predikat Nilai SAKIP Balitbangda Provinsi Jambi menjadi "BB".

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada maka Balitbangda Provinsi Jambi membuat beberapa strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan serta dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, seperti sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan penelitian pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme penelitian pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme penelitian pembangunan daerah.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penelitian pengembangan daerah.
5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara institusi penelitian dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara penelitian dan penganggaran.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses penelitian
7. Meningkatnya kualitas SDM penelitian terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional penelitian yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian Pembangunan Daerah.
8. Optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi penelitian pembangunan.

1.4. Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Balitbangda Provinsi Jambi, yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi

diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Balitbangda Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2023.

Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2023

NO.	STRUKTUR JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	4	1	5
3.	Eselon IV	1	3	4
JUMLAH		5	5	10

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas terlihat bahwa posisi Pejabat Struktural di Balitbangda Provinsi Jambi sudah lengkap serta proporsi Pejabat Struktural untuk Perempuan dan Laki-laki memiliki proporsi yang hampir sama banyak dan sudah mencerminkan keseimbangan gender.

Tabel 1.2. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin per 31 Desember Tahun 2023

NO.	JENIS JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	STRUKTURAL	5	5	10
2.	JF PENELITI	1	3	4
3.	JF ARSIPARIS	0	1	1
4.	JF ANALIS DATA ILMIAH	0	1	1
5.	JF ANALIS KEBIJAKAN	5	3	8
6.	JF ANALIS PERENCANAAN	0	1	1
7.	JF UMUM	7	12	19
JUMLAH		18	26	44

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas terlihat masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai Balitbangda Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional tertentu dimana sebagian besar pegawai masih menduduki jabatan fungsional umum. Ada 3 (tiga) orang Fungsional Peneliti yang sedang Tugas Belajar, penambahan jabatan fungsional peneliti sangat diperlukan agar memberikan kinerja Balitbangda Provinsi Jambi secara maksimal.

Tabel 1.3. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2023

NO.	JENIS GOLONGAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	GOLONGAN I	0	0	0
2.	GOLONGAN II	1	1	2
3.	GOLONGAN III	9	18	27
4.	GOLONGAN IV	7	8	15
JUMLAH		17	27	48

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel 1.3. di atas dapat dilihat pegawai Balitbangda Provinsi Jambi paling banyak menduduki Golongan III , diikuti Golongan IV dan terakhir Golongan II. Dari total pegawai Balitbangda Provinsi Jambi jumlah Perempuan dan Laki-laki masih didominasi dengan pegawai Perempuan.

Tabel 1.4. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin per 31 Desember Tahun 2023

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	SLTA	1	2	3
2.	S1	4	14	18
3.	S2	11	7	18
4.	S3	2	3	5
JUMLAH		18	26	44

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel 1.4. di atas dapat dilihat pegawai Balitbangda Provinsi lebih banyak didominasi S1 dan S2 dan menyusul S3.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruangrapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Balitbangda Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Balitbangda Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.5. Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Alat-alat besar	-	-
2	Alat-alat angkutan	23 Unit	
	- Kendaraan Roda 4	9 Unit	Baik
	• Kendaraan Roda 2	14 Unit	Baik
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	-	
4	Alat-alat Pertanian dan Peternakan	1	
5	Alat kantor dan rumah tangga	660 Jenis	
6	Alat studio dan alat komunikasi	2 Jenis	1 Rusak
7	Komputer	87 Jenis	
8	Bangunan gedung	1 Unit	Baik
9	Jaringan	-	-
10	Buku perpustakaan	-	-
11	Alat-alat Kesehatan	2 jenis	Baik

Sumber : Balitbangda Daerah Provinsi Jambi, 2023

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Balitbangda Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi tahun 2023 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2023 Balitbangda Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 10.367.798.353,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 10.346.627.424,- dan belanja modal sebesar Rp. 21.170.929,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Meliputi 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Anggaran Perubahan Balitbangda Provinsi Jambi sebesar Rp. 9.750.426.353,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 9.732.316.082,- dan belanja modal sebesar Rp. 18.110.271,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Meliputi 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan LKjIP Balitbada Provinsi Jambi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, penjelasan umum perangkat daerah dengan penekanan pada aspek strategis organisasi seperti tugas dan sasaran sebagaimana penjabaran visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh perangkat daerah dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, tabel perjanjian kinerja. Penjelasan apakah ada perbedaan antara target kinerja pada renja tahun 2023 dengan yang diperjanjikan kinerjanya tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah

ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah out put kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab 2 berisi :

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2019
- 2.4. Instrumen Pendukung

2.1. Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2022, Balitbangda Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang merupakan manifestasi komitmen Balitbangda Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama 5 (lima) tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Balitbangda Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi Pembangunan, yaitu ***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (JAMBI MANTAP)”***.

- Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerinth Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman** : terciptanya dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatkan iklim investasi, terujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupam di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah** : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat plural.
- Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitip dan karakter penuh tanggung jawab.

Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2021-2026 seiring dengan berakhirnya masa jabatan

Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia**, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Misi pertama, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas yang mana sasaran adalah : a. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan b. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.

Misi kedua, yaitu : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah dengan tujuan memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditi unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana sasaran strategis yang dilakukan adalah : a. memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan; b. meningkatkan industri pengolahan; c. meningkatkan peran sektor pariwisata serta IKM pendukung pariwisata; d. memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar; e. Meningkatkan kualitas lingkungan; f. Menurunnya tingkat pengangguran; dan g. Meningkatnya ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan.

Misi ketiga, yaitu : memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya, agamis dan berkesetaraan gender yang mana sasaran strategis adalah : a. meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; b. meningkatnya akses terhadap pendidikan; c. meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya; d. meningkatnya toleransi intra dan antar agama; dan e. meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Visi: “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Dibawah Ridho Allah SWT”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan public yang prima	Skor Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
					Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB	Memantapkan Pengelolaan Komoditas Unggulan non pertambangan	Kontribusi sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
				Meningkatnya industry pengolahan	Kontribusi industry pengolahan terhadap PDRB
				Meningkatkan peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB
				Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar	Rasio Konektivitas
					Akses terhadap air minum layak
					Rasio elektrifikasi
					Persentase luas sawah beririgasi
					Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet
				Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK) (juta ton CO2 eq)
			Tingkat kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka
				Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks Ketahanan Pangan
3.	Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya akses terhadap Pendidikan	Rata-rata lama sekolah
				Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat

				dan budaya	
				Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi
				Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks Pemberdayaan Gender

Sumber: RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Dari Visi dan Misi Jambi MANTAP yang telah ditetapkan dimaksud, Balitbangda Provinsi Jambi sebagai OPD yang merupakan unsur penunjang, bertanggung jawab dalam pengkoordinasian proses penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Provinsi Jambi, Balitbangda Provinsi Jambi turut bertanggungjawab dalam mewujudkan ketiga misi pembangunan tersebut. Misi yang terkait dengan tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi adalah Misi Kesatu yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

Disamping itu, eksistensi Balitbangda Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya ketiga misi Gubernur.

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang baik tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya penelitian yang baik. Penelitian merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan. Inilah peran yang sangat strategis yang harus dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 maka tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai berikut :

Dalam Upaya mewujudkan Misi Kesatu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung *e-governmant* yang terintegrasi maka **Tujuan** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah maka ditetapkan Sasaran Strategis T_1S_1 : Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi; T_1S_2 : Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan; dan T_1S_3 : Meningkatnya Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk Mendukung Daya Saing Daerah.

Pencapaian sasaran strategis Balitbangda Provinsi Jambi merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program Balitbangda Provinsi Jambi 2021-2026. Indikator sasaran perlu ditetapkan agar pencapaian sasaran strategis dapat lebih terukur dan kebijakan yang dibutuhkan

untuk mewujudkan hal tersebut lebih terarah. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian Kelitbangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi untuk dimanfaatkan sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi/ naskah akademik/ model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	60%	65%	70%	75%	80%
				Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang masuk dalam Jurnal Ilmiah	30%	40%	45%	50%	50%
			Meningkatnya Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk	Indeks Inovasi Daerah	59,50	60,00	60,50	61,00	61,50
				Persentase OPD kategori Inovatif dan Sangat Inovatif	30%	35%	40%	50%	50%

			Mendukung Daya Saing Daerah	Persentase teknologi yang dikembangkan atau diimplementasikan stakeholder	80%	80%	80%	80%	80%
				Persentase Dokumen yang siap didaftarkan HKI-nya	80%	80%	80%	80%	80%
				Persentase Kerjasama yang terjalin	80%	80%	80%	80%	80%

Sumber : Renstra Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategi Balitbangda Provinsi Jambi

N0	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Peningkatan Kuliatas Laporan Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Melakukan konsultasi dengan OPD pembina dan pengawas Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan landasan regulasi/kebijakan yang menjadi prioritas dan isu strategis 2. Mendorong pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RIK 2. Peningkatan dukungan anggaran penelitian dan pengembangan yang dibarengi dengan perbaikan kualitas dan kemanfaatan output litbang 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penelitian dan pengembangan 4. Peningkatan kualitas dan sinergitas program penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kemanfaatan hasil 5. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui penyediaan dan penyebaran kertas kerja kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief) kepada para pemangku kepentingan 6. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (problem solving) melalui pemanfaatan hasil Litbang 7. Publikasi hasil kelitbangan melalui berbagai bentuk media cetak dan elektronik, seperti penulisan ilmiah terakreditasi, seminar nasional dan diskusi publik
		Meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk mendukung daya saing daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Fasilitasi penguatan penerapan teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkoordinasian program SIDA dengan OPD di Pemerintah Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kab/Kota se-Provinsi Jambi 2. Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan komoditi SIDA 3. Penilaian pelaksanaan inovasi di OPD

			<p>dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p>3. Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi ke masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya KI/invensi</p> <p>4. Pengembangan jejaring kemitraan antar institusi penelitian dan pengembangan</p>	<p>4. Fasilitasi dan pembinaan inovasi OPD secara sinergi dan terpadu</p> <p>5. Pemberian penghargaan dan penyediaan insentif bagi OPD inovatif</p> <p>6. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD terkait Pemerintah Provinsi Jambi dan Balitbangda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi</p> <p>7. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, inkubator bisnis dan masyarakat</p> <p>8. Meningkatkan motivasi masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan intelektual</p> <p>9. Memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual</p> <p>10. Meningkatkan kerja sama dengan peneliti/perekayasa, perguruan tinggi dan badan litbang lainnya</p>
--	--	--	---	---

Sumber : Renstra Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen sebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	BB Predikat
2.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	65%

Sumber : Renstra Balitbangda Provinsi Jambi , 2022

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Tahun Anggaran 2023 Balitbangda Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 10.367.798.353,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 10.346.627.424,- dan belanja modal sebesar Rp. 21.170.929,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Meliputi 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Anggaran Perubahan Balitbangda Provinsi Jambi sebesar Rp. 9.750.426.353,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 9.732.316.082,- dan belanja modal sebesar Rp. 18.110.271,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Meliputi 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

2.3.1. Target Belanja Balitbangda Provinsi Jambi

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 9.750.426.353,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 9.732.316.082,- dan belanja modal sebesar Rp. 18.110.271,-.

Tabel 2.5. Target Belanja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Prosentase
1	Belanja Operasional	9.732.316.082,-	99,81%
2	Belanja Modal	18.110.271,-	0,19%
JUMLAH		9.750.426.353,-	100%

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Balitbangda Daerah Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi**

No.	Sasaran	Kegiatan	Anggaran		Persen- tase	Keterangan
			B. Operasional	B. Modal		
1.	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 266.950.664		2,74%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.682.379.020		68,53%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 69.750.000		0,72%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 530.330.185		5,44%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Rp. 18.110.271	0,19%	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 405.715.585		4,16%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 546.388.800		1,03%	
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 310.206.358		3,18%	Program Penelitian dan Pengembangan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp. 100.630.000		1,03%	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 142.882.250		1,47%	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 677.083.220		6,94%	
Jumlah			Rp. 9.732.316.082	18.110.271	100	

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Balitbangda Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 berisi :

3.1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*

3.2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*

3.3. *Realisasi Anggaran*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Balitbangda Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balitbangda Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Balitbangda Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA/ KODE WARNA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	BB Prediket	BB (70)	B (66,35)	94,79%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	%	65%	100%	153,85%	Sangat Baik

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Perjanjian Kinerja menyebutkan bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja utama disajikan dalam Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Nilai BB	Balitbangda Provinsi Jambi	Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 (Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang sudah diaplikasikan) / (Jumlah Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang dihasilkan) X 100% n-1	Balitbangda Provinsi Jambi	Laporan Akhir Kegiatan

Sumber : IKU Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Tahun 2023, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Balitbangda Provinsi Jambi mencapai target yang telah ditetapkan. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1 : Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi dengan indikator kinerjanya, yaitu : Nilai AKIP.

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensinya atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggungjawab.

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 terkait Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balitbangda Provinsi Jambi, terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, meliputi : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; dan 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Balitbangda Provinsi Jambi memperoleh nilai 66,35 yang menunjukkan dalam kategori **B** atau **Baik**.

Pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	70 (BB)	66,35 (B)	94,79%

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5. Capaian Kinerja 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP	(BB Prediket) Nilai AKIP	62	70,18	113,19	63	70,27	111,54	70	66,35	94,79

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Dari Tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2023 mengalami penurunan Nilai AKIP dari tahun 2022. Berdasarkan LHE terhadap AKIP Tahun 2022 Balitbangda Provinsi Jambi dari Inspektorat, penurunan nilai AKIP dipengaruhi sebagai berikut :

1. Komponen Perencanaan Kinerja, sub komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dimana Aktivitas yang dilaksanakan belum mendukung kinerja yang ingin dicapai yaitu Rencana Aksi tidak memuat Target Kegiatan, Jumlah Anggaran, Penanggung Jawab Kegiatan dan Target Kinerja yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung kinerja. Untuk Tahun 2023, Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi telah dibuat sesuai dengan format SK Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi`
2. Komponen Pelaporan Kinerja, sub komponen Kualitas Pelaporan Kinerja : Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional. Hal ini sudah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023 bahwa *"Sampai laporan ini diselesaikan penyusunannya, belum terdapat standar nasional untuk kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang disusun oleh Kementerian maupun Instansi Vertikal pada bidang kelitbang, sehingga realisasi capaian kinerja Balitbangda Provinsi Jambi tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional"*.
3. Komponen Pelaporan Kinerja, sub komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja : LKjIP Balitbangda Provinsi Jambi belum menyajikan faktor pendorong dan faktor hambatan pencapaian realisasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi. Akan dilakukan perbaikan dalam penyusunan LKjIP Tahun 2023.
4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sub komponen Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, belum ada tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi LHE AKIP Tahun 2021. LHE AKIP Balitbangda Tahun 2022 telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat ke Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dengan Nomor : S527/BALITBANGDA-1.3/IX/2023 tanggal 5 September 2023 perihal Penyampaian Matrik Tindak Lanjut LHE atas AKIP Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022.

Penurunan Nilai AKIP Balitbangda Provinsi Jambi, disebabkan karena keterbatasan jumlah personel di Subbag Program dan Pelaporan (sebanyak 2 orang ASN dan 1 PTT) dengan beban kerja yang ada dan merangkap tugas sebagai Pengurus Barang serta kurang koordinasi/komunikasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Mengatasi permasalahan yang ada, Balitbangda Provinsi Jambi akan melakukan koordinasi yang intens dengan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi terkait penyusunan LKjIP Balitbangda Provinsi Jambi.

Sasaran #2 : Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder*.

Dengan perhitungan $(\text{Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang sudah diaplikasikan}) / (\text{Jumlah Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang dihasilkan}) \times 100\%$. Dengan asumsi n-1 (2023-1) yaitu hasil capaian di Tahun 2022, maka realisasi Capaian Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Tahun 2022 Balitbangda Provinsi Jambi melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di bidang-bidang, yaitu :

Hasil Penelitian dan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2022

1. **KONSEP PERCEPATAN OPEN DEFECATION FREE DI PROVINSI JAMBI (KABUPATEN KERINCI, BUNGO DAN TANJUNG JABUNG BARAT).** *“Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial”.*

Penelitian dilakukan di tiga kabupaten dengan sampel 3 (tiga) desa yaitu Kabupaten Kerinci Desa Sungai Renah (akses jamban sehat 1,64%), Kabupaten Bungo Desa Renah Jelmu (akses jamban sehat 18,66%) dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Rantau Benar (akses jamban sehat 10,47%) . Ketiga desa tersebut memiliki akses jamban masih dibawah 25%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku masih buang air besar sembarangan disebabkan faktor budaya yaitu desa Sungai Renah dengan tingkat kehidupan ekonomi yang mendukung tapi memiliki perilaku lebih suka buang air besar di sungai dan belum terbiasa BAB di WC karena ada perasaan tidak nyaman. Sementara desa Renah Jelmu dan Rantau Benar BABS terjadi karena faktor ekonomi. Penduduk yang masih BABS karena tidak mampu membuat WC di rumah, selain itu untuk desa Renah Jelmu kasus yang ditemui beberapa penduduk yang punya WC tetap BABS ke sungai dikarenakan kesulitan air bersih. Model pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan konsep *perceptan Open Defecation Free* adalah melalui analisis model CIPP yaitu menilai indikator dari kontek, input, proses dan dampak (informasi diperoleh dari masyarakat, kader, kepala desa, petugas sanitarian dan fasilitator) dan pendekatan analisis stakeholder yang menilai peran dan kontribusi pemangku

kepentingan untuk mewujudkan desa stop BABS dengan menilai kontribusi yang sudah dilakukan dan menilai sejauh mana pemangku kepentingan menganggap penting dan urgennya program Stop BABS dan berapa besar Kekuatan yang diberikan untuk program desa *Open Defecation Free*.

Rekomendasi Kebijakan :

- a. Penyusunan regulasi daerah dalam bentuk peraturan Gubernur, Walikota/Bupati, Kepala Desa/Datuk Rio tentang Desa ODF guna dijadikan pedoman warga desa melaksanakan program ODF.
- b. Dukungan dalam bentuk koordinasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan pengendalian penduduk Provinsi Jambi kepada dinas pemberdayaan Desa di setiap Kabupaten untuk mendorong Pemerintah Desa perlu :
 - a. Menganggarkan khusus kegiatan untuk Stop BABS, karena selama ini masih dianggap bukan program prioritas;
 - b. Untuk membantu kekurangan petugas sanitarian, pemerintah desa perlu membentuk kader-kader desa; dan
 - c. Dalam mempengaruhi masyarakat untuk stop BABS kepala desa perlu mengajak ketua adat atau lembaga adat sebagai role model desa.
- c. Dukungan dan pembinaan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Kepada Dinas Kesehatan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi untuk :
 - a. Mendorong pemerintahan desa membentuk *natural leader* dari masyarakat sebagai agen perubahan perilaku untuk STOP BABS yang dilatih oleh dinas kesehatan dan fasilitator 6;
 - b. Rekrutmen petugas *outsourcing sanitarian* untuk satu desa satu *sanitarian* untuk mendorong konsep percepatan STOP BABS 0 % Tahun 2024; dan
 - c. Mendorong pemerintahan desa memiliki kelengkapan data masyarakat desa yang tidak mampu membangun jamban sehat dan belum mampu mengakses air bersih *by name by addres* guna memenuhi persyaratan menerima bantuan jamban sehat.
- d. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bersama Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat dan PDAM perlu menyamakan persepsi tentang program Stop BABS, sehingga ada sinergisitas dalam melakukan dukungan Stop BABS di Kabupaten dan Kota untuk menerapkan Konsep Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Menuju 100% Desa ODF Tahun 2024 (menggambarkan strategi, arah kebijakan, fokus kegiatan, keterlibatan stakeholder dan dukungan provinsi).
- e. Perlu Surat Keputusan Bupati untuk menunjuk keterlibatan stakeholder dalam mengimplementasikan konsep percepatan desa ODF.

- f. Program Desa ODF menjadi bagian pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten dan Provinsi sebagai aspirasi bahwa masyarakat yang masuk dalam skala prioritas untuk dibahas dalam RAPBD tahun berjalan

Penelitian ini merupakan usulan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dengan tema Evaluasi keberhasilan program-program Kesehatan lingkungan dan Kesehatan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Setelah dilaksanakan Sidang Majelis Pertimbangan Kelitbangan maka tema di atas difokuskan menjadi Konsep Percepatan *Open Defecation Free* Di Provinsi Jambi dengan lokus di Kabupaten Kerinci, Bungo dan Tanjung Jabung Barat. Rekomendasi penelitian telah disampaikan ke Bapak Gubernur Jambi, DPRD Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sebagai pengusul. Rekomendasi hasil penelitian tersebut dijadikan acuan Dinas Kesehatan dalam mengambil kebijakan untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi program Stop BABS dan program desa *Open Defecation Free*.

2. **EFEKTIFITAS PENETAPAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) SEBAGAI PANGKALAN GAS DI PROVINSI JAMBI.** “Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan”

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang merupakan turunan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah status BUM Desa menjadi Badan Hukum. BUM Desa dengan berbagai bidang usahanya antara lain sebagai pangkalan gas akan menjadi salah satu solusi dalam masalah penyaluran gas 3 kg di daerah. Telah dilakukan penelitian yang berjudul Efektifitas Penetapan BUM Desa sebagai Pangkalan Gas di Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan, kendala yang dihadapi, strategi dan efektifitas penetapan BUM Desa sebagai pangkalan gas di Provinsi Jambi. Metode penelitian menggunakan *Mix Methode* dengan analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab pokok permasalahan dan kendala dalam penetapan BUM Desa sebagai pangkalan gas, analisis SWOT untuk menemukan strategi penetapan BUM Desa sebagai pangkalan gas dan teori efektifitas untuk menentukan keefektifan penetapan BUM Desa sebagai pangkalan gas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan penyebaran kuisioner ke lima lokasi yang merupakan desa terpilih yang memiliki BUM Desa sebagai pangkalan gas di Provinsi Jambi berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (P3AP2) Provinsi Jambi.

Rekomendasi Kebijakan :

- a. Pemerintah Provinsi mengeluarkan surat dalam bentuk SK gubernur ataupun Surat Edaran agar Pemerintah kabupaten/Kota berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan distribusi LPG 3 Kg dan menyediakan anggaran untuk kegiatan tersebut.
- b. Pemerintah Prov. Jambi perlu meminta realisasi LPG 3 Kg bersubsidi yang telah disalurkan oleh PT. Pertamina kepada agen-agennya setiap trip dan menyampaikannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengecekan apakah kuota yang ditetapkan telah sesuai atau tidak.
- c. Pemerintah Provinsi Jambi membuat surat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat melaporkan setiap penyelewengan yang dilakukan oleh Agen dan Pangkalan secara tertulis dan meminta secara resmi kepada PT. Pertamina untuk dapat memberikan sanksi tegas sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 62 ayat 1 dan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- d. Perlu Pengawasan dari Pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam distribusi gas saat ini.
- e. Program penetapan BUM Desa sebagai pangkalan gas di perluas diseluruh Provinsi Jambi, satu Desa Satu BUM Desa pangkalan gas perlu dikaji dan dijadikan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi.

Penelitian ini merupakan usulan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (P3AP2) Provinsi Jambi, dengan tema Skema perijinan dan penetapan BUMDesa sebagai pangkalan gas. Rekomendasi penelitian telah disampaikan ke Bapak Gubernur Jambi, DPRD Provinsi Jambi dan Dinas P3AP2 Provinsi Jambi sebagai pengusul. Rekomendasi hasil penelitian menjadi solusi dalam permasalahan penyaluran barang bersubsidi berupa Gas Elpiji 3 Kg.

3. POTENSI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN STRATEGI PENANGANANNYA DI PROVINSI JAMBI. (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DAN KABUPATEN SAROLANGUN). *“Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat”*

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa desa memiliki kedaulatan meskipun bersifat terbatas karena desa merupakan entitas yang mempunyai legitimasi dan recognisi dalam bentuk peraturan dan adat istiadat yang khas

secara turun temurun. Namun dalam praktiknya, kedaulatan desa ini sering terhambat karena posisi kewenangan desa masih sering “dilangkahi” oleh unit pemerintahan yang lebih tinggi. Upaya yang dilakukan desa untuk melindungi Sumber Daya Alamnya seringkali kalah dengan kepentingan pemerintah daerah ataupun pusat yang memberikan ijin kepada sector-sektor yang ingin mengeksploitasi Sumber Daya Alam yang berada di wilayah desa. Saat ini juga masih banyak wilayah desa yang belum memiliki batas wilayah yang jelas, sehingga seringkali menimbulkan sengketa antara desa dan instansi/individu yang melakukan aktivitas berdekatan dengan wilayah desa.

Rekomendasi Kebijakan :

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka implikasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan yang menjadi potensi timbulnya konflik adalah konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, sengketa batas antar desa, kerusakan lingkungan oleh aktivitas perusahaan, Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, Tanah Kas Desa (TKD), Pengurus dan anggota koperasi dari luar desa, klaim tanah antarwarga dan perusahaan, dan tumpang tindih kepemilikan tanah warga antarwarga. Dan potensi konflik lainnya yang dapat terjadi adalah aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan aktifitas Illegal drilling.
- b. Terhadap kondisi di atas dapat direkomendasikan, agar Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten melalui OPD Terkait dalam hal ini Kesbangpol untuk menyusun skala prioritas penanganan potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Sarolangun agar prediksi konflik yang mungkin terjadi dapat diantisipasi sesegera mungkin dan tidak meluas. Beberapa skala prioritas yang dapat dilakukan adalah dengan cara; pertama memaksimalkan fungsi dan tugas Tim PPB (penetapan dan Penegasan Batas Desa) sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 untuk menyelesaikan masalah batas desa yang belum selesai dilakukan, kedua sesuai dengan amanat Pasal 13 Ayat (2) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 agar gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa, ketiga memaksimalkan dan mengoptimalkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Propinsi Jambi yang sudah dibentuk agar melakukan langkah-langkah teararah dan terukur untuk menyelesaikan berbagai macam konflik Sumber Daya Alam (SDA).
- c. Berkaitan dengan upaya penanganan terhadap potensi konflik di atas ada yang belum ditangani sama sekali dan ada yang sudah ditangani tetapi belum diselesaikan secara tuntas. Permasalahan yang belum ditangani dapat menjadi konflik yang lebih besar dan Ringkasan Eksekutif: Potensi Konflik Sumber Daya Alam (Sda) Dan Strategi Penanganannya

Di Provinsi Jambi. (Studi Kasus Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Kabupaten Sarolangun) 10 Halaman | 10 meluas. Dalam penanganan konflik belum mengoptimalkan fungsi dan tugas Tim PPB (penetapan dan Penegasan Batas Desa), belum memberdayakan lembaga adat setempat karena belum semua desa membentuk Lembaga Adat Desa (LAD), dan belum optimalnya kerja Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial hal ini menunjukkan belum terjalin sinergi yang kuat antara elemen kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan potensi konflik yang terjadi.

- d. Terhadap kondisi diatas dapat direkomendasikan agar dalam penanganan konflik diupayakan melibatkan secara masif lembaga adat di masing-masing daerah dan desa, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi bersama secara periodik dan berkesinambungan, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 10 Ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 bahwa salah satu fungsi Lembaga Adat Desa (LAD) adalah mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian berbagai macam sengketa termasuk sengketa tanah dan konflik dalam interaksi manusia. Salah satu model penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah Mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Penelitian ini merupakan usulan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi., dengan tema Potensi Konflik Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi. Rekomendasi penelitian telah disampaikan ke Bapak Gubernur Jambi, DPRD Provinsi Jambi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebagai pengusul. Rekomendasi hasil penelitian menjadi solusi dalam permasalahan yang sering terjadi konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, sengketa batas antar desa, kerusakan lingkungan oleh aktivitas perusahaan, Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, Tanah Kas Desa (TKD).

4. EFEKTIFITAS PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) BANTUAN BARANG BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI PROVINSI JAMBI. (SUMBER DANA APBD PROVINSI JAMBI TA 2021). *“Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan”.*

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan kajian efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bantuan berupa Barang bagi pelaku usaha mikro di Provinsi Jambi, yang pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, serta merumuskan strategi kebijakan pemberian bantuan bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh Pelaku Usaha Mikro penerima bantuan barang tahun anggaran 2021. Selain analisis deskriptif juga dilakukan analisis dengan metode Mc Nemar dan metode Analytical Hierarchy Process, untuk rumusan rekomendasi didasarkan atas best practice dari

penelitian dan kebijakan yang telah ada. Temuan penelitian membuktikan 95,10% pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan selama Pandemi Covid-19, bantuan barang yang diberikan berpengaruh signifikan dan efektif dalam meningkatkan pendapatan dan produksi. Temuan selanjutnya bahwa 86,27% penerima bantuan tidak berharap program berupa barang/peralatan dilanjutkan, namun berharap bantuan berupa uang. Adapun strategi yang direkomendasikan dalam pemberian bantuan UMKM kedepannya adalah, melalui penyaluran dan pembayaran secara non-tunai.

Rekomendasi Kebijakan :

- a. Berdasarkan analisis strategi diatas menunjukkan bahwa perlu ada perubahan kebijakan dalam pemberian bantuan bagi UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Dimana Penyaluran dan pembayaran bantuan dilakukan secara elektronik/non tunai hal ini akan memberikan dampak yang lebih baik. Namun dalam penerapan model ini harus ada dilakukan sosialisasi, diskusi dan persamaan persepsi di awal dari pihak terkait baik pemerintah daerah, penerima bantuan, UMKM mitra dan pihak perbankan, sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban bagi penerima bantuan akan lebih mudah, kemudian dapat memberikan dampak Multiplier Effect yang luas bagi para pelaku UMKM lain. Sedangkan rekomendasi dari beberapa best practice dan kajian penelitian serta peraturan yang ada, maka model pemberian bantuan elektronik/non tunai dengan mereplikasikan sebagian konsep non tunai dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Adapun Mekanisme Bantuan Non Tunai Pemerintah Provinsi Jambi yang direplikasikan mulai dari tahapan pengusulan, penyaluran, dan penggunaan dana. Adapun pihak yang terlibat secara aktif, yakni; UMKM Penerima Bantuan, UMKM Mitra Penerima, Perbankan sebagai Bank Penyalur, Pemerintah Provinsi Jambi sebagai pemberi bantuan. Dalam mekanisme penggunaan dana, walaupun telah disalurkan ke rekening penerima bantuan namun dalam penggunaannya pencairan dana hanya dapat dilakukan secara non-tunai (Cashless), baik melalui transfer antar rekening, sistem QRIS atau debet rekening dari rekening UMKM Penerima Bantuan ke Rekening UMKM Mitra Penerima. Secara rinci terlihat pada Gambar 1. Implikasi lain dari mekanisme ini, maka bantuan Pemerintah Provinsi Jambi dapat memberikan multiflyer efek yang terukur bagi banyak pelaku UMKM di Provinsi Jambi, sistem elektronik juga memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan
2. Alternatif strategi pemberian bantuan bagi UMKM yang kedua adalah melalui bantuan dalam bentuk barang atau peralatan, sedangkan pemberian bantuan modal secara tunai merupakan alternatif strategi terakhir yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Jambi. Apabila alternatif rekomendasi pemberian bantuan dalam bentuk barang atau peralatan yang dilakukan, maka perlu dilakukan survey pendataan kebutuhan barang/peralatan yang sangat dibutuhkan. Sehingga bantuan barang/peralatan yang diberikan dapat bermanfaat, berdaya guna, dan memberikan dampak bagi pengembangan usaha kedepannya. Apabila alternatif terakhir bantuan uang diberikan secara tunai dilakukan, maka perlu dilakukan pengawasan pertanggung jawaban secara konsisten dan tidak hanya dalam bentuk pelaporan penggunaan dana yang sudah disalurkan. Beberapa kajian sebelumnya telah membuktikan bahwa masyarakat atau pihak penerima bantuan usaha mikro cenderung akan melakukan penyalahgunaan dana untuk hal yang konsumtif, sehingga tidak produktif dan sesuai dengan tujuan bantuan untuk pengembangan usaha.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencari solusi mengentaskan kemiskinan di provinsi Jambi, dengan memberdayakan UMKM dengan memberikan bantuan finansial maupun kelembagaan untuk pengembangan usaha yang sudah ada. Rekomendasi penelitian telah disampaikan ke Bapak Gubernur Jambi, DPRD Provinsi Jambi dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

5. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN GEOPARK MERANGIN JAMBI MENUJU WARISAN DUNIA. *“Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan”.*

Konsep *UNESCO Global Geopark (UGG)* adalah berupaya menawarkan peluang untuk mengembangkan, mengenalkan, dan melindungi situs warisan bumi ke tingkat global. Geopark dapat dimanfaatkan untuk mengenali kembali hubungan manusia dengan geologi yang menarik untuk penelitian, pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, karena selain mengandung keindahan dan kelangkaan, terdapat juga fenomena yang mengandung sejarah, kejadian dan proses pembentukan bumi. Keadaan ini berpeluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi baru. Geopark Merangin Jambi adalah salah satu Geopark nasional yang berupaya untuk dapat diakui sebagai UNESCO Global Geopark (UGG). Kawasan Geopark Merangin Jambi terbentang melewati 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin dengan luas 4940,34 Ha atau sekitar 64% dari luas Kabupaten Merangin. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin Tahun 2020, Kawasan Geopark terdiri atas beberapa peruntukan, yakni sebagai kawasan hutan (lindung/produksi) seluas 52%, sebagai perkebunan seluas 28% dan sisanya merupakan lokasi keberadaan site-site inti Geopark.

Rekomendasi Kebijakan :

- a. Membangun wadah koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota) dan Pemangku Kepentingan (OPD Terkait, Akademisi, Pihak Swasta, Komunitas dan Media) dalam rangka penetapan kebijakan dan pengembangan Geopark Nasional Merangin Jambi terkait kebutuhan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Integrasi dan Sinkronisasi pada dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran antar pemangku kepentingan/OPD terkait baik di tingkat Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota dengan kawasan terkait dengan pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di lokasi Geopark Nasional Merangin Jambi.
- c. Mengupayakan Geopark Nasional Merangin Jambi menjadi Kawasan Strategis Nasional sehingga Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk Policy Brief Balitbangda Provinsi Jambi 13 mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya lokal dan nasional dapat terjaga. Dan Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa dan masyarakat lokal.
- d. Menciptakan Kawasan Geopark Nasional Merangin Jambi menjadi area Cluster Ekonomi Kreatif Baru dengan mengeksplorasi potensi produk UMKM lokal baik dalam bentuk kerajinan, atraksi budaya dan kuliner khas masyarakat lokal sehingga dapat memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi pemberdayaan masyarakat.
- e. Dukungan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta (BUMN) sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pengembangan Geopark Nasional Merangin Jambi terutama dari aspek penyediaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengedepankan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDG's).

Penelitian ini merupakan program Gubernur Jambi dalam visi misi beliau untuk menjadikan Kawasan GEOPARK Merangin menjadi Warisan Budaya Dunia. Rekomendasi penelitian telah disampaikan ke Bapak Gubernur Jambi, DPRD Provinsi Jambi, Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jambi, serta Dinas PUPR Provinsi Jambi. Rekomendasi ini menjadi kebijakan dalam melaksanakan program kegiatan di OPD terkait, sehingga aksesibilitas dan mobilitas ke Kawasan Geopark Merangin menjadi lancar dengan penyediaan infrastruktur penunjang serta kesiapan masyarakat di sekitar Kawasan.

6. **STRATEGI PEMANFAATAN LIMBAH PADAT KELAPA SAWIT DI PROVINSI JAMBI.** *“Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan”.*

Harga minyak sawit yang terus naik setiap tahun menyebabkan kebutuhan akan buah kelapa sawit pun tinggi. Produktivitas buah sawit yang tinggi dan luas areal kebun sawit bertambah. Hal ini menyebabkan peningkatan volume limbah sawit padat di kebun petani atau kelompok masyarakat. Di ikuti harga sawit yang tinggi menyebabkan petani sawit enggan mengolah limbah padat sawit. Mereka sudah cukup puas dengan harga Tandan Buah Sawit (TBS) segar sehingga mengabaikan limbah kelapa sawit padat yang berlimpah di areal perkebunan. Melimpahnya limbah sawit padat menjadi masalah tersendiri terutama bagi lingkungan. Namun banyaknya limbah perkebunan sawit di Provinsi Jambi memiliki dampak positif. Limbah sawit apabila dimanfaatkan dan diolah menjadi suatu produk oleh masyarakat akan memiliki nilai tambah. Perlu suatu kegiatan dan cara untuk meningkatkan nilai ekonomi dari limbah padat sawit sehingga membuat masyarakat tertarik untuk ikut serta memanfaatkannya.

Rekomendasi Kebijakan :

- a. Memberikan bantuan stimulan inovasi teknologi pengolahan limbah padat kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan (environmental friendly) dan juga dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi (economic benefit). Teknologi ini dilakukan dengan cara menghasilkan produk baru yang dapat dijual kembali dengan memanfaatkan limbah padat kelapa sawit tersebut. Selain itu juga mudah dan murah dalam operasional pengelolaannya terutama bagi masyarakat.
- b. Menciptakan dan meningkatkan kesadaran terkait dengan kerangka kebijakan dan regulasi pada semua aktor dapat mendorong terjadinya peningkatan mekanisme pengaturan pengelolaan limbah padat kelapa sawit yang lebih efektif dengan membangun sistem yang dapat mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan limbah padat kelapa sawit. Sehingga, keberlanjutan kebijakan pada proses pengelolaan limbah padat kelapa sawit harus didukung dengan adanya perubahan yang mendasar pada mekanisme koordinasi antar stakeholder. Pemerintah harus menjamin dengan peraturan dan sanksi yang tegas jika limbah kelapa sawit tidak dikelola dengan baik. Perlu diciptakan suatu ruang koordinasi tersendiri untuk meningkatkan keterlibatan semua pihak dan bahkan jika memungkinkan dapat memasukkan pihak swasta dalam program manajemen limbah padat kelapa sawit.
- c. Perlu adanya kebijakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat petani kelapa sawit tentang pemanfaatan limbah padat kelapa sawit melalui program pemberdayaan

masyarakat tentang pengolahan limbah yang memberikan manfaat secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini memberikan solusi untuk meningkatkan nilai ekonomi dari limbah padat sawit dengan tidak mengabaikan limbah kelapa sawit padat yang berlimpah di areal perkebunan menjadi masalah bagi lingkungan. Rekomendasi penelitian telah disampaikan ke Bapak Gubernur Jambi, DPRD Provinsi Jambi, dan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi. Rekomendasi ini menjadi kebijakan dalam melaksanakan program kegiatan di OPD terkait, sehingga permasalahan menumpuknya limbah padat kelapa sawit dapat teratasi sekaligus menambah penghasilan masyarakat di sekitar pabrik kelapa sawit/perkebunan.

7. IDENTIFIKASI POTENSI DAERAH DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS SEKTOR BASIS MENUJU KAWASAN EKONOMI BARU SENTUSA. *“Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan”*

Pembangunan ekonomi pada daerah 3 (tiga) kawasan Tanjung Jabung Barat Tanjung Timur dan Muaro Jambi masih belum memaksimalkan, terutama pengembangan sektor primer ke pengembangan produksi sekunder. Kondisi saat ini masih menembatkan Tanjung Jabung Timur memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi, disusul Tanjung Jabung Barat. Sementara Kabupaten Muaro Jambi memiliki tingkat pengangguran terbuka ketiga terbesar di Provinsi Jambi. Secara potensi ketiga daerah ini memiliki sektor unggulan.

Potensi hasil-hasil perkebunan, pertanian dan perikanan memiliki peluang besar untuk pengembangan sektor sekunder. Pengembangan kawasan ekonomi baru (SENTUSA) merupakan terobosan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tiga daerah tersebut dan sebagai tiang penonggak memperkuat ekonomi kawasan tersebut sehingga mampu sebagai trigger atau memicu pertumbuhan ekonomi disekitarnya atau memberi dampak multiplier efek. Pengembangan kawasan SENTUSA menekankan pada pengolahan produk primer menuju produk sekunder dengan membangun industry pengolahan yang memberi peluang pada kinerja ekspor, merespon tumbuh investasi baik domestik maupun asing dan mendorong pertumbuhan berbagai aktivitas bisnis di segala sektor. Pembangunan industry pengolahan didukung oleh potensi komoditas unggulan yang menyediakan bahan baku secara berkelanjutan dan dekat dengan pengguna karena adanya peluang akses ekspor melalui pelabuhan laut.

Rekomendasi Kebijakan :

- a. Setiap Kabupaten menentukan arah Pengembangan komoditas unggulan ke sektor sekunder perlu membuat skala prioritas dari hasil-hasil perkebunan, pertanian dan perikanan berdasarkan pohon industri yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang akan menjadi ICON masing-masing kabupaten yang dikoordinir Badan Perencanaan Daerah.
- b. Pengembangan komoditas unggulan ke sektor sekunder harus memperhatikan hasil analisis SWOT dan menjalankan strategi, arah kebijakan, fokus kegiatan, keterlibatan kelembagaan dan dukungan provinsi yang tertera dalam road map (peta jalan), dalam hal ini perlu pembentukan tim persiapan daerah untuk mewujudkan tahapan-tahapan perencanaan pengembangan komoditas kesektor sekunder.
- c. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah membuat perencanaan yang mengarah pada rencana kegiatan SENTUSA (rencana strategi pada peta jalan) yang diperkuat oleh Badan Perencanaan Daerah Dan PUPR daerah yang disesuaikan dengan rencana tata ruang Provinsi Jambi.
- d. Masing-masing Kabupaten menggandeng Pihak SWASTA dan BUMN untuk berkolaborasi mewujudkan kawasan Ekonomi BARU SENTUSA terkait pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan, pertanian dan perkebunan
- e. Pengembangan Kawasan Industri harus berbasis penataan ruang yang disinkronisasikan pembangunan di Kabapten dan Provinsi
- f. Badan Perencanaan Daerah Provinsi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembinaan, dukungan, koordinasi dan sosialisasi tahapan rencana pengembangan kawasan ekonomi baru SENTUSA ke Kabupaten yang menjadi daerah pengembangan kawasan ekonomi baru SENTUSA
- g. Perlu penelitian lebih lanjut terkait pembentukan kawasan industri yang tepat yang dekat dengan bahan baku dan pelabuhan akhir.

Penelitian ini merupakan program Gubernur Jambi dalam visi misi beliau untuk menjadikan Kawasan Sengeti, Tungkal dan Sabak menjadi kawasan ekonomi baru. Rekomendasi penelitian telah disampaikan ke Bapak Gubernur Jambi, DPRD Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Rekomendasi ini menjadi dasar OPD dalam mengambil kebijakan terkait program kegiatan di OPD tersebut.

8. **PENGELOLAAN PENYAKIT MATI MERANGGAS DUKU DI PROVINSI JAMBI (STUDI KASUS PADA VARIETAS UNGGUL DUKU KUMPEH DAN MUARO PANCO).** *“Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.*

Duku Kumpeh dan Duku Muaro Panco telah menjadi ikon Provinsi Jambi yang bercita rasa manis, namun produktivitas duku di Provinsi Jambi menurun tajam akibat serangan penyakit mati meranggas yang disebabkan oleh jamur *Phytophthora palmivora*. Pada umumnya penyakit mati meranggas sangat merugikan, baik secara ekonomi, maupun dalam penurunan hasil produksi buah duku, bahkan menyebabkan kematian tanaman dalam waktu relatif singkat. Hal akan bermuara punahnya salah satu kekayaan plasma nutfah yang dimiliki Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui kondisi eksisting serangan penyakit mati meranggas pada duku Kumpeh dan duku Muaro Panco, 2) membahas respon petani duku terkait pengelolaan penyakit mati meranggas, 3) merumuskan strategi alternatif pengelolaan penyakit mati meranggas. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan observasi, wawancara dan FGD. Pemilihan wilayah penelitian dilakukan secara purposive yaitu 3 desa di Kecamatan Kumpeh Ulu dan 2 desa di Kecamatan Renah Pembarap. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan program Microsoft excel 2016. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, respon petani digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan skala Likert, dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi serangan penyakit mati meranggas di Kecamatan Kumpeh Ulu pada 3 desa sebesar 56,66%, sementara 2 desa di Kecamatan Renah Pembarap sebesar 99%. Respon petani terkait pengelolaan penyakit mati meranggas baik 3 desa di Kecamatan Kumpeh Ulu maupun 2 desa di Kecamatan Renah Pembarap berada pada kategori rendah. Rekomendasi penelitian adalah membuat rencana aksi program pencegahan dan pengelolaan penyakit mati meranggas, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Rekomendasi Kebijakan :

Rekomendasi penelitian adalah membuat rencana aksi program pencegahan dan pengelolaan penyakit mati meranggas, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- a. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam jangka waktu pendek antara lain : 1. Dinas TPHP Provinsi Jambi mendorong adanya surat edaran terkait darurat penyakit mati meranggas duku di wilayah sentra produksi duku; 2. Kepala Desa mengusulkan dan mendorong adanya payung hukum menggunakan dana desa untuk kegiatan prioritas duku; 3. Petani melakukan pengendalian secara preventif/ fokus menyelamatkan tanaman duku yang belum terserang dengan melakukan pengendalian penyakit secara intensif melalui aplikasi bubur bordo, pemupukan, dan sanitasi lingkungan; 4. Dinas TPHP Provinsi/Kabupaten melakukan sosialisasi/advokasi kepada TAPD dan Banggar DPRD terkait anggaran untuk pencegahan penyakit duku; 5. Melakukan rehabilitasi dengan menyediakan area kebun khusus/demplot termasuk lahan, bibit sambung pucuk, pupuk dan alsintan yang diawasi oleh Pengendali Hama Penyakit dengan catatan diberikan

kompensas; 6. Petani melakukan eradikasi pada tanaman terserang berat, diawasi oleh Petugas Pengendali Hama Penyakit; 7. Balai Benih Induk menyediakan bibit sambung pucuk dan melaksanakan bimtek kepada petani untuk membuat bibit sambung pucuk; 8. Perguruan tinggi mendorong mahasiswa, akademisi dan praktisi untuk melaksanakan kajian epidemis secara teknis dan komprehensif; 9. Dinas TPHP kabupaten membentuk atau mengaktifkan kembali wadah/forum petani peduli duku; dan 10. Komitmen tegas sistematis dan terarah dari pihak pemangku kepentingan dengan rencana aksi pengendalian terus berlanjutnya penyebaran penyakit.

- b. Sementara rencana aksi Jangka Panjang adalah : 1. Melakukan replanting tanaman duku dan penanaman tanaman sela yang cepat panen; 2. Memberikan kompensasi biaya eradikasi per batang; 3. Melakukan Pemuliaan tanaman untuk menyelamatkan plasma nutfah duku sebagai sumberdaya genetik loka; dan 4. Meningkatkan SDM Pengendali Hama Penyakit (PHP) dan PPL melalui bimtek penyakit mati meranggas.

Penelitian ini merupakan usulan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, dengan tema Penyakit mati meranggas duku (MMD) pada tanaman duku yang disebabkan oleh Jamur *Phytophthora Palmivora*. Rekomendasi penelitian telah disampaikan ke Bapak Gubernur Jambi, DPRD Provinsi Jambi dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi sebagai pengusul. Penelitian ini untuk melihat kondisi eksisting serangan penyakit mati meranggas pada duku Kumpeh dan duku Muaro Panco, membahas respon petani dan merumuskan strategi alternatif pengelolaan penyakit mati meranggas. Rekomendasi hasil penelitian menjadi solusi dalam permasalahan yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, untuk meminimalisir dampak dari penyakit mati meranggas tanaman duku.

Dari 8 (delapan) penelitian yang dilaksanakan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022, rekomendasi hasil penelitian tersebut sudah disampaikan ke Bapak Gubernur, DPRD Provinsi Jambi dan OPD terkait atau yang mengusulkan. Dari 8 (delapan) penelitian tersebut semua rekomendasi hasil penelitian menjadi pedoman bagi OPD dalam mengambil kebijakan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan tupoksi OPD sehingga program dan kegiatan dapat berhasil dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Provinsi Jambi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	65%	100%	153,85%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2023

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Capaian Kinerja 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%	Tahun 2022		%
			Target	Target		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	Persentase	50%	100%	200%	60%	100%	166,67 %	65%	100%	153,85 %

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Tabel 3.7. di atas dapat dilihat bahwa rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan Balitbangda Provinsi Jambi menjadi pedoman OPD pengusul atau terkait dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam melaksanakan program kegiatan.

3.3. Bentuk Penyajian Data Kinerja

Bentuk penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja tahunan hendaknya juga mempertimbangkan segi-segi efektivitas penyampaian informasi. Oleh karena itu, penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja tahunan instansi pemerintah pada dasarnya dapat dilakukan secara naratif, tabel maupun grafis atau kombinasi diantara ketiganya agar dapat dibaca dengan baik dan mudah dimengerti oleh penggunanya.

Dalam penyusunan laporan kinerja tahunan instansi pemerintah perlu dipilih metode-metode penyajian yang cocok. Tidak ada satu bentuk penyajian yang paling unggul secara keseluruhan, sehingga dalam penyusunan laporan kinerja tahunan, masing-masing entitas akuntabilitas pada instansi pemerintah diharapkan dapat menentukan bentuk penyajian yang mana yang cocok untuk menyampaikan suatu informasi tertentu.

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. . Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

No.	Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 202	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			2022	2023	2024		
1.	Nilai AKIP	B (62)	BB (70,27)	B (66,35)		BB (70)	94,79%
2.	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	50%	100%	100%		65%	153,85%

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah, mengalami penurunan Nilai SAKIP menjadi 66,35 (B) dan 70,27 (BB) tahun 2022. Untuk Indikator Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya melebihi target yang telah ditentukan yaitu 65% dengan realisasi 100%.

Walaupun masih terdapat kekurangan, namun secara menyeluruh capaian kinerja mengalami peningkatan. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan rutin terkait administrasi perkantoran dapat terpenuhi dengan cukup baik.
2. Adanya keinginan dan usaha untuk meningkatkan kinerja instansi.
3. Anggaran yang cukup memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023 antara lain:

1. Jumlah Sumber Daya Aparatur yang tidak memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Fasilitas kerja yang kurang memadai (laptop/komputer/printer) sehingga menghambat kelancaran kinerja dan produktifitas pegawai.
3. Kurangnya sinergi antara bagian dan subbagian
4. Kurangnya koordinasi dengan OPD Pembina SAKIP
5. Pengawasan yang masih relatif lemah

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Sampai laporan ini diselesaikan penyusunannya, belum terdapat standar nasional untuk kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang disusun oleh Kementerian maupun Instansi Vertikal pada

bidang kelitbangan, sehingga realisasi capaian kinerja Balitbangda Provinsi Jambi tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional.

3.4. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Tahun 2023 Dana APBD-P sebesar Rp. 11.376.449.966,- dengan rincian sebagai berikut :

➤ Belanja Operasional	Rp. 9.732.316.082,-
➤ Belanja Modal	Rp. 18.110.271,-

Penyerapan anggaran belanja Operasional pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.909.287.273,- (97,02%) dari total anggaran yang dialokasikan. Penyerapan anggaran belanja Modal pada tahun 2023 sebesar Rp. 18.004.950,- (99,42%) dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 1.225.736.401,- (99,42%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 8.414.601.515 (98,77%). Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023, Penyerapan belanja sebesar Rp. 9.640.337.916,- atau 98,87% dengan sisa anggaran Rp. 110.088.437,- (1,132%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung yang dikelola Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 262.915.506,- atau 98,49% dengan sisa anggaran Rp. 4.035.158,- (1,51%), meliputi sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Penyerapan belanja sebesar Rp. 183.832.268,- atau 99,77% dengan sisa anggaran Rp. 414.782,- (0,23%) dengan keluaran sub kegiatan 4 dokumen yang terdiri dari Dokumen Renja Murni, Dokumen Renja Perubahan, Dokumen Renstra Perubahan dan Laporan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Penyerapan belanja sebesar Rp. 8.877.171,- atau 96,18% dengan sisa anggaran Rp. 352.929,- (3,82%) dengan keluaran sub kegiatan 3 dokumen yang terdiri dari Dokumen RKA-SKPD Murni, Dokumen RKA-SKPD Perubahan, dan Laporan Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Penyerapan belanja sebesar Rp. 4.638.028,- atau 91,06% dengan sisa anggaran Rp. 455.472,- (8,94%) dengan

keluaran sub kegiatan 3 dokumen yang terdiri dari Dokumen DPA-SKPD Murni, Dokumen DPA-SKPD Perubahan, Laporan Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD.

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyerapan belanja sebesar Rp. 4.638.028,- atau 91,06% dengan sisa anggaran Rp. 455.472,- (8,94%) dengan keluaran sub kegiatan Laporan yang terdiri dari Laporan Cascading, Executive Summary, Laporan Tahunan, LKj, LKPJ, LPPD, LPPK dan Laporan Evaluasi

2. Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 6.631.614.731,- atau 99,24% dengan sisa anggaran Rp. 50.764.289,- (0,76%), dengan keluaran sub kegiatan jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 44 orang/bulan selama 14 bulan. Banyaknya sisa anggaran, untuk mengantisipasi adanya mutasi pegawai, kenaikan tunjangan fungsional, gaji berkala dan kenaikan pangkat.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 68.228.600,- atau 97,82% dengan sisa anggaran Rp. 1.521.400,- (2,18%), meliputi sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Penyerapan belanja sebesar Rp. 38.628.000,- atau 99,05% dengan sisa anggaran Rp. 372.000,- (0,95%), dengan keluaran sub kegiatan jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya sebanyak 1 paket.
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, Penyerapan belanja sebesar Rp. 29.600.600,- atau 96,26% dengan sisa anggaran Rp. 1.149.400,- (3,74%), dengan keluaran sub kegiatan jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 10 orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum

Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 529.910.180,- atau 99,92% dengan sisa anggaran Rp. 420.005,- (0,08%), meliputi sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyerapan belanja sebesar Rp. 10.851.550,- atau 100% dengan sisa anggaran Rp. 0,- (0%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyerapan belanja sebesar Rp. 145.706.372,- atau 99,84% dengan sisa anggaran Rp. 226.840,-

(0,16%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 2 paket.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyerapan belanja sebesar Rp. 26.138.600,- atau 99,33% dengan sisa anggaran Rp. 175.400,- (0,76%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan, Penyerapan belanja sebesar Rp. 39.998.343,- atau 99,98% dengan sisa anggaran Rp. 8.657,- (0,02%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 2 paket.
- Sub Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Penyerapan belanja sebesar Rp. 307.215.315,- atau 100% dengan sisa anggaran Rp. 0,- (0%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi sebanyak 45 laporan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 18.004.950,- atau 99,42% dengan sisa anggaran Rp. 105.321,- (0,58%), dengan keluaran sub kegiatan pembelian 1 unit HP Samsung.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 380.929.060,- atau 93,89% dengan sisa anggaran Rp. 24.786.525,- (6,11%), meliputi sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyerapan belanja sebesar Rp. 37.349.776,- atau 99,95% dengan sisa anggaran Rp. 19.824,- (0,05%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 laporan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik. Penyerapan belanja sebesar Rp. 150.472.230,- atau 85,91% dengan sisa anggaran Rp. 24.673.700,- (14,09%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan. Masih banyaknya sisa anggaran, dikarenakan untuk mengantisipasi kekurangan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bulan Desember.
- Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 193.107.054,- atau 99,95% dengan sisa anggaran Rp. 93.001,- (0,05%), dengan

keluaran sub kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 2 laporan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP. Penyerapan belanja sebesar Rp. 522.998.488,- atau 95,72% dengan sisa anggaran Rp. 23.390.312,- (4,28%), meliputi sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 389.116.528,- atau 95,31% dengan sisa anggaran Rp. 19.132.272,- (4,69%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 23 unit kendaraan. Banyaknya sisa anggaran dikarenakan, masih dianggarkannya honor staf PPTK pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.840.000,- dan sesuai dengan SK Gubernur Jambi Nomor 524/KEP.GUB/BPKPD-7.2/2003 tentang Penunjukkan Pemakai Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga) Milik Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023, poin KEEMPAT dimana para pemakai kendaraan dapat diberikan biaya eksploitasi dan pemeliharaan setiap bulan Rp. 200.000,- sehingga untuk satu tahun sebesar Rp. 2.400.000,- sedangkan dalam DPA-SKPD sesuai dengan SSH dianggarkan sebesar Rp. 3.810.000,-.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 103.882.000,- atau 96,06% dengan sisa anggaran Rp. 4.258.000,- (3,94%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 4 unit kendaraan.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 29.999.960,- atau 99,99% dengan sisa anggaran Rp. 40,- (0,01%), dengan keluaran sub kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 30 unit, berupa pemeliharaan AC, Laptop, dan Komputer.

b. Program Penelitian dan Pengembangan

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 310.206.358,- dengan realisasi sebesar Rp. 309.986.146,- (99,93%). Sub Kegiatan ini melaksanakan :

- Seminar Alquran pada Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits (STQH) Tingkat Nasional XXVII Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 319 Tahun 2022 tentang Penetapan Provinsi Jambi sebagai Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Musabaqah Al-Hadits Tingkat Nasional XXVII Tahun 2023. Seminar ini bertujuan untuk memelihara, mengembangkan, serta meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, serta untuk menyebarluaskan ajaran Al-Qur'an dan Hadits.
- Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah. Pemerintah Pusat menyusun indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun untuk bahan evaluasi.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

Dengan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 100.630.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.086.317,- (99,46%). Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Stakeholder. Sub kegiatan ini melaksanakan Penelitian dengan judul **"UPAYA PERCEPATAN PERUNURUNAN STUNTING DI PROVINSI JAMBI : ANALISIS DATA ADMINISTRATIF DAN STUDI KUALITATIF"**. Penelitian ini dilatarbelakangi : Prevalensi stunting Provinsi Jambi pada tahun 2022 sebesar 18,0% dengan prevalensi tertinggi di Kabupaten Batanghari (26,3%) dan terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (9,9%). Prevalensi di Provinsi Jambi tersebut masih jauh dari target. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempercepat proses penurunan prevalensi stunting tersebut (Republik Indonesia, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Apa saja faktor-faktor terkait prevalensi/proporsi stunting di Provinsi Jambi berdasarkan hasil eksplorasi data administratif ?
2. Apa saja pendukung dan kendala dalam upaya penanggulangan stunting, terutama di Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Barat?

Penelitian ini dilakukan dengan cakupan seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi dengan lokus spesifik pada Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode yang digunakan menggunakan Pendekatan kuantitatif dilaksanakan terlebih dahulu dengan memadankan prevalensi stunting dari survey-survey nasional dengan data-data administrative dan Pendekatan kedua dilakukan secara kualitatif dengan studi

kasus pada Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Barat. Eksplorasi terkait faktor pendukung dan penghambat dalam upaya-upaya penurunan stunting melalui diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan menghadirkan pemangku kebijakan.

REKOMENDASI

1. Secara Umum, perlu dilakukan penguatan analisis situasi :

Studi kasus : Batanghari

- Jumlah balita banyak; PUS rendah; PUS hamil banyak; Istri terlalu tua; Anak terlalu banyak
- Peningkatan penggunaan KB modern pada PUS usia 35 tahun ke atas

Studi Kasus : Tanjung Jabung Barat

- Air minum dan sanitasi tidak layak tinggi
- Pengadaan/perbaikan infrastruktur air minum dan sanitasi; anggaran pusat dan PDAM

2. Secara teknis, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan penanganan lebih lanjut terhadap Kabupaten/Kota dengan tingkat prevalensi tinggi untuk berat badan lahir rendah (<2.500 gram), Panjang badan lahir rendah (< 48 cm) dan stunting pada bayi berusia kurang dari 2 tahun, jika kondisi kekurangan gizi pada periode ini tertangani dengan baik maka berpotensi untuk menekan angka stunting di tahun 2024
- b. Menyiapkan posyandu di setiap desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi, dengan adanya Posyandu di setiap desa/ kelurahan, maka peran dan keaktifan masyarakat serta petugas kesehatan harus lebih ditingkatkan.
- c. Mensosialisasi dan mengedukasi perihal kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan empat kali selama kehamilan
- d. Pemerintah perlu membuat program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara gratis untuk balita, terutama di kabupaten atau kota yang mempunyai banyak kasus stunting.
- e. Melakukan pelatihan untuk dokter, bidan, ahli gizi dan kader untuk mendeteksi stunting dengan intervensinya.
- f. Pemerintah perlu melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan rutin setiap bulan di posyandu-posyandu di seluruh Provinsi Jambi.

- g. Untuk kabupaten Batanghari, Strategi penanggulangan dapat diprioritaskan pada penggunaan KB modern pada pasangan usia subur.
 - h. Peningkatan peran akademisi/Balitbangda sebagai think tank dalam pemetaan kasus dan resiko stunting
 - i. Optimalisasi pengukuran untuk deteksi dini kasus underweight, wasting, stunting terutama pada 1,000 HPK
 - j. Kerjasama dengan semua stakeholder dan lintas sektor, misalnya dengan sektor pendidikan dan keagamaan, akan sangat bermanfaat dalam kesuksesan kegiatan promosi. Melibatkan TNI dalam persoalan pernikahan dini dengan pengawasan di desa-desa melibatkan Babinsa. Melibatkan KUA dalam sosialisasi pernikahan dini.
 - Terkait masalah anggaran penanganan stunting selain bersumber dari dana APBD, dapat bersumber dari dana kegiatan yang ada di OPD, misalnya menggunakan dana desa dengan adanya penyeragaman alokasi anggaran dana desa dalam penanganan stunting.
 - Anggaran penanganan stunting bisa juga dengan melibatkan anggaran dunia usaha atau perusahaan yang ada di Provinsi Jambi agar ikut terlibat dengan persoalan di Masyarakat dengan bantuan dana Community Social Responsibility (CSR).
 - k. Perlu adanya monitoring berkala oleh Kepala Daerah/Kepala TPPS Kabupaten Kota. Peningkatan peran serta dan kerjasama lintas OPD dalam penanganan stunting. Peran Kepala Daerah dalam penanganan prevalensinya stunting sangat berpengaruh, seperti yang terjadi di Kabupaten Tanjabar, dapat menurunkan angka prevalensi stunting dengan berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh Kepala Daerah.
 - l. Provinsi Sumatera Selatan membentuk tim kecil di luar TPPS sebagai *think tank* (sebagai pembanding)
3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Jumlah anggaran sebesar Rp. 142.882.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 142.527.562,- (99,75%). Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder*. **“ANALISIS KEBERLANJUTAN KINERJA UMKM DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI”**.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, karena memberikan kesempatan kerja dan penghasilan bagi masyarakat yang kurang mampu (Maksimov, Wang and Luo, 2017; Manzoor et al., 2019), Namun dalam pertumbuhan UMKM masih banyak menemukan permasalahan untuk tumbuh, bertahan dan berkembang diantaranya kesulitan meminjam uang pada Bank, kurangnya pengalaman manajemen dan infrastruktur yang tidak mendukung (Okpara, 2011).

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

Menentukan kelompok usaha menuju gagal dan berhasil

1. Mengetahui gambaran sumber daya keuangan, adopsi teknologi, dukungan pemerintah dan orientasi kewirausahaan pada kategori jenis perusahaan menuju gagal dan berhasil
2. Menganalisis hubungan orientasi kewirausahaan terhadap sumber daya keuangan dan adopsi teknologi
3. Menganalisis hubungan sumber daya keuangan dan adopsi teknologi terhadap keberhasilan Usaha Kecil dan Mikro
4. Menganalisis dukungan pemerintah memoderasi hubungan antara orientasi kewirausahaan terhadap sumber daya keuangan dan adopsi teknologi
5. Menganalisis skenario strategi menghindari kegagalan Usaha Mikro dan Kecil dan meningkatkan keberhasilan Usaha Mikro dan Kecil

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dapat di sarankan beberapa rekomendasi yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dalam meningkatkan keberlanjutan kinerja pelaku usaha UMKM dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut :

1. Menekan pada perilaku praktek mengelola keuangan dengan baik melalui program pemberdayaan terintegrasi dari pemerintah Provinsi bersama pemerintah kota dan kabupaten secara intensip (melibatkan seluruh dinas yang melakukan pembinaan terhadap UKM dibawah koordinasi Dinas koperasi dan UKM memberi program pemberdayaan pada pengelolaan keuangan usaha secara merata dengan membentuk kelompok-kelompok usaha, mengingat keterbatasan pendanaan dari pemerintah maka perlu pembentukan kelompok usaha dalam bentuk komunitas usaha membantu berbagi pengetahuan sesama UKM dalam penyelesaian persoalan UKM.
2. Ditemui bahwa kelompok UKM teridentifikasi menuju gagal dan kelompok berhasil

memiliki persoalan hampir sama dari sisi orientasi kewirausahaan, sumber daya keuangan, adopsi teknologi, kinerja dan tingkat keberhasilan, hal ini dikhawatirkan pada kelompok berhasil jika program penguatan karakter wirausaha atau modal psikologi tidak dibangun dengan maksimal melalui pembinaan dan motivasi, maka kelompok berhasil akan teridentifikasi menuju gagal. Oleh karena itu koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antar pemerintah provinsi, kota, kabupaten dan pemerintah desa, melibatkan lembaga non pemerintah secara intensif melakukan penguatan karakter wirausaha berorientasi pada penggunaan teknologi, dan memperbaiki manajemen usaha terkait manajemen keuangan, pemasaran dan kinerja UKM.

3. Untuk mengakomodir keseluruhan UKM sampai ke pelosok maka pemerintah provinsi, kabupaten, kota, lembaga non pemerintah dan pemerintahan desa menyelenggarakan pelatihan daring yang dapat diikuti oleh banyak peserta sehingga dapat melakukan penghematan dana. Metode lain berbagi pengetahuan terkait kebutuhan UKM dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten bekerjasama dengan perguruan tinggi melakukan pengabdian masyarakat untuk memberdayakan UKM, pemberdayaan UKM juga dapat dilakukan oleh perguruan tinggi melalui program kuliah kerja nyata untuk memberdayakan UKM yang berada di pelosok daerah yang memiliki keterbatasan untuk akses ke kota, Untuk calon wirausaha baru adanya kerjasama lembaga pendidikan dengan pemerintah serta memperkuat inkubator pada dunia pendidikan seperti perguruan tinggi.
4. Program pemberdayaan UKM dapat dilakukan oleh pemerintah desa menggunakan dana desa, oleh karena itu adanya sinergitas dinas koperasi UKM dan Dinas perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Pemberdayaan Desa bersama Kabupaten Dinas tersebut yang ada di Kabupaten melakukan himbauan terhadap pemerintahan desa untuk memberdayakan UKM yang ada di pedesaan membangun karakter orientasi kewirausahaan, berorientasi pada e-commerce dengan menggunakan platform penjualan yang bisa menjangkau pasar sekitar.
5. Bagi UKM yang memiliki kinerja baik dan produk yang sudah baik, maka pemerintah provinsi bekerja bersama kabupaten/kota, pemerintah desa dan komunitas entrepreneur memperluas pangsa pasar UKM ke pasar internasional dengan cara Pertama, UKM perlu fokus pada pemenuhan aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi, memperhatikan keunggulan produk, dan mempersiapkan

produk yang diminati oleh pasar, baik domestik maupun internasional. Kedua, memperkuat kelembagaan dan manajemen usaha. Ketiga, meningkatkan mindset dan kompetensi digital, serta ke empat, mempelajari prosedur ekspor, dapat dimulai dengan onboarding pada platform e-commerce maupun bekerjasama dengan aggregator (perusahaan yang menampung ragam produk UKM). Untuk itu perlu data base UKM yang mampu untuk go online secara internasional untuk dikembangkan lebih lanjut dan mengakomodir aggregator untuk pasar internasional UKM di Provinsi Jambi.

6. Pemerintah provinsi mendorong pemerintahan kabupaten dan kota serta pemerintahan desa dan lembaga bukan pemerintah yang ikut melakukan pendampingan terhadap UKM membuat rencana aksi atau target pencapaian dengan menyediakan database dengan konsep 3C (*coordination, collaboration, communication*), untuk membuat mapping kelompok UKM dalam bentuk pemberdayaan yang sesuai kebutuhan. Dengan data tersebut dapat sebagai dasar untuk mengetahui jumlah UKM yang sudah mendapat pemberdayaan, dan jenis pemberdayaan yang sudah diberikan sehingga tumpang tindih program pemberdayaan dapat dihindarkan dan pemerataan program pemberdayaan dapat dilakukan.
7. Temuan ini memberi rekomendasi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengukur tingkat efisiensi UKM menggunakan sumber daya keuangan, proses usaha dan keuntungan karena saat ini UKM di Provinsi Jambi sedang dihadapkan pada persoalan kesulitan kondisi keuangan dan tingkat penjualan produk.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Jumlah anggaran sebesar Rp. 677.083.220,- dengan realisasi sebesar Rp. 673.136.376,- (99,42%). Meliputi Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 55.640.680,- atau 99,83% dengan sisa anggaran Rp. 96.820,- (0,17%), sub kegiatan ini melaksanakan Analisis Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jambi Tahun 2022.

Pengukuran IDSD Provinsi Jambi Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai indeks daya saing daerah Provinsi Jambi yang bisa digunakan untuk mengukur daya saing daerah melalui perekonomian, infrastruktur, inovasi dan faktor lainnya. Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada Global Competitiveness Index (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri 4 Komponen, 12 Pilar

dan 62 Indikator. Berdasarkan hasil pengukuran IDSD Tahun 2022 diketahui bahwa nilai Indeks Daya Saing Provinsi Jambi meningkat dari tahun 2021 yakni 1,86 menjadi 2,89 pada tahun 2022, akan tetapi dari sisi peringkat, posisi Provinsi Jambi turun yang pada tahun 2021 berada di peringkat 23 menjadi peringkat ke 30 pada tahun 2022. Dari 12 pilar yang di gunakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIN) hanya 4 pilar yang nilai indeksnya berada diatas dan mendekati rata-rata Nasional (3,49) antara lain Pilar Kesehatan (3,83), Adopsi TIK(3,47), Keterampilan (3,70) dan Pilar Institusi (4,35).

- Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 206.711.946,- atau 99,63% dengan sisa anggaran Rp. 772.054,- (0,37%), sub kegiatan ini melaksanakan Lomba Inovasi Produk Daerah Provinsi Jambi. Inovasi dapat diperoleh melalui *discovery* (penemuan), inovasi (penciptaan, perancangan) maupun pembaharuan suatu produk dengan metode atau cara yang baru. Sehingga inovasi dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Kemudian pengaplikasian inovasi dapat dibedakan pula dalam tiga bentuk, yakni: inovasi produk (*product innovation*), inovasi dalam pelayanan (*service innovation*) dan inovasi proses (*process innovation*). Inovasi produk merupakan pemunculan produk baru. Inovasi pelayanan adalah cara baru dalam bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan. Sedangkan inovasi proses adalah sebuah cara baru untuk membuat proses dalam menghasilkan produk atau jasa menjadi lebih ekonomis.

Guna mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berbudaya kreatif serta inovatif, dalam penerapan teknologi yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat serta mendorong terciptanya hilirisasi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional, maka Balitbangda Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Lomba Inovasi Produk Daerah (IPDa) Provinsi Jambi Tahun 2023. Penuh harapan agar kegiatan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan kemandirian masyarakat di Provinsi Jambi, serta mendorong kreatifitas dan inovasi dalam membangun industri kreatif.

Pemenang yang dinobatkan pada acara Final Lomba Inovasi Produk Daerah sebagai berikut :

a. Masyarakat Umum

Pemenang	Nama Inovator	Alamat
Juara I	Ardyan Eka Saputra Guntoro	Tanjung Jabung Barat
Juara II	Hajrawati	Desa Tangkit Baru
Juara III	Hadrawi	Tanjung Jabung Barat
Juara Harapan I	Taufiq Natogu Anwa Eko Prastyo Adam Al-Fatah	Muaro Jambi
Juara Harapan II	Yunita Puspita Dewi,S.Pd Reni Oktaviani,S.Pd	Kota Jambi
Juara Harapan III	Indarmien Netty Ariasih Surina Didik Sunaryadi Sholeha Annisa Martines	Gading Mas Estate

b. Perguruan Tinggi

Pemenang	Nama Inovator	Asal PT
Juara I	Qomariah	Universitas Jambi
Juara II	Joko Prabowo Hariansyah Heru Irawan	Politeknik Jambi
Juara III	M.Riyan Sulari Budi Saputra Disky Iryansha	Politeknik Jambi
Juara Harapan I	Aditya Ahmad Frenti Haryatama Putri Pria Abdillah Hendra	Universitas Jambi
Juara Harapan II	Mukhamad Samson Huda Yohannes Pasaribu Pransisko Juperino Ambarita	Politeknik Jambi
Juara Harapan III	Apriyanto Aldo Tri Ilham Zk Khoirul Huda	Universitas Jambi

- Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 198.319.886,- atau 99,55% dengan sisa anggaran Rp. 904.934,- (0,45%), sub kegiatan ini melaksanakan kegiatan :

- Lomba Inovasi Daerah antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam berbagai

bentuk, yaitu : Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi dalam bentuk lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi daerah tidak harus selalu dalam bidang sistem informasi dan teknologi (IT) serta perizinan; dapat pula dalam tata kelola, kerja sama, dan optimalisasi sumber pendanaan. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Masyarakat, agar lebih optimal sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah hadir menjadi dasar *legal framework* dalam implementasi inovasi daerah, dimana perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan diamanatkan untuk menjadi pendorong pertumbuhan inovasi daerah mengingat lembaga litbang memiliki fungsi strategis yang bertugas melakukan verifikasi dan evaluasi usulan inovasi daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 8 mengamanatkan bahwa Penelitian dan Pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana hasil dari penelitian dan pengembangan diharapkan dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dilaksanakan lomba ini untuk memotivasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi; meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan masyarakat, tata kelola pemerintahan , dan inovasi lainnya; Mendorong penerapan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Good Government; dan memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi, yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, pelayanan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Penganugerahan Penghargaan kepada pemenang lomba tersebut di laksanakan pada tanggal 12 Desember 2023, bertempat di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi. Hadir pada kesempatan tersebut pejabat perwakilan dari OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan pejabat perwakilan Pemerintah Kabupaten / Kota se- Provinsi Jambi. Hadir pada acara tersebut Gubernur Jambi

yang diwakili Husairi (staf ahli Bidang Pemerintahan, Kukum dan Politik). Dalam sambutannya Gubernur Jambi yang dibacakan staf ahli.

Pemenang Lomba/Pengukuran Indeks Inovasi Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi :

No.	Nama OPD	Indeks / Skor	Kategori/ Predikat	Juara
1.	RSUD Raden Mattaheer Provinsi Jambi	76,14	Sangat Inovatif	Juara I
2.	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi	75,92	Sangat Inovatif	Juara II
3.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	67,54	Sangat Inovatif	Juara III
4.	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	38,82	Inovatif	Juara Harapan I
5.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	30,16	Inovatif	Juara Harapan II
6.	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	16,54	Inovatif	Juara Harapan III

Pemenang Lomba/Pengukuran Indeks Inovasi Daerah antar Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jambi.

No.	Nama Kabupaten/Kota	Indeks / Skor	Kategori/ Predikat	Juara
1.	Kota Jambi	92,15	Ter-Inovatif	Juara I
2.	Kabupaten Kerinci	79,75	Sangat Inovatif	Juara II
3.	Kota Sungai Penuh	65,21	Sangat Inovatif	Juara III
4.	Kabupaten Bungo	37,94	Inovatif	Juara Harapan I
5.	Kabupaten Tebo	37,53	Inovatif	Juara Harapan II
6.	Kabupaten Sarolangun	35,91	Inovatif	Juara Harapan III

- Keikutsertaan Provinsi Jambi dalam *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2023 yang dilaksanakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri RI di Jakarta

Indeks inovasi daerah bertujuan untuk memacu pemerintah daerah agar terus berinovasi dengan memanfaatkan data inovasi yang jelas. Pengisian indeks Inovasi

daerah mudah dilakukan dan dapat diakses oleh semua pemerintah daerah. Dalam pengukurannya, indeks inovasi daerah mengacu pada indikator yang merujuk pada satuan pemerintah daerah serta indikator satuan inovasi. Indikator satuan pemerintah daerah bersifat umum, yaitu berisi data visi misi, kelembagaan, jumlah inovasi dan sebagainya. Sedangkan indikator satuan inovasi, lebih mengarah pada pengukuran kualitas serta dampak inovasi yang dilakukan daerah, seperti adanya payung hukum, agenda bimbingan teknis, informasi mengenai layanan, jajak pendapat masyarakat, dan beberapa data lainnya. Sebab, melalui data tersebut bakal diketahui kondisi inovasi di seluruh daerah, dan memudahkan pemerintah Provinsi Jambi dalam melakukan pembinaan inovasi ke OPD sehingga diperlukan pemahaman indikator untuk mengisi seluruh aplikasi indeks inovasi yang diperlukan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Badan Strategi Kebijakan Nasional (BSKDN) Kemendagri RI adalah seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan Penginputan Data yang sesuai Indikator Innovative Government Award (IGA) untuk dilakukan penilaian.

Oleh karena itu teknis penginputan data pada Indikator, Bobot, Definisi dan Panduan Pengisian yang benar untuk diinput pada Aplikasi Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023, Indikator yang harus menjadi perhatian khusus dan wajib di isi meliputi dalam penginputan IGA seperti Data Mandatory, Rancang Bangun (minimal 300 kata), Visi Misi Pemda, Penerapan SIPD, APBD tepat waktu, Peningkatan PAD, Opini BPK, Capaian Lakip, Investasi dan indikator lain terkait dengan Pemda.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri menyarankan jika ada OPD yang inovasinya lebih dari 10 inovasi, sebaiknya menunjuk Personil yang mempunyai kompetensi tentang IT dan kecepatan dalam Penginputan IGA.

Adapun Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) kepada Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Penghargaan diserahkan kepada 95 Pemerintah Daerah yang terbagi dalam 11 kategori. Usai memberikan sambutan dan arahan para kepala daerah kedua menteri tersebut menyerahkan Penghargaan IGA 2023 kategori daerah Tertinggal dan Perbatasan Terinovatif serta kategori lainnya.

- Penandatanganan Komitmen antara Kementerian PANRB dan Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 14 Maret 2023 tentang pembentukan HUB Jaringan Inovasi

Pelayanan Publik (HUB JIPP) Provinsi Jambi. *Hub JIPP* merupakan platform yang digunakan untuk pembinaan inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan, sebagaimana diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan diadakannya *Hub JIPP* ini, Kementerian PANRB akan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi yang ditetapkan sebagai *Hub JIPP* Daerah.

- Ikut serta dalam Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Jambi mengirimkan 5 Proposal Inovasi Pelayanan Publik antara lain : SIADIK (Sistem Administrasi Dinas Pendidikan) dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; SUDUNG BELAJA (Belajar dimanapun), Kapan bae dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; POS PULIH (Pos Pengaduan Lingkungan Hidup) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi; SIDABAGJA (SISTEM INFORMASI DANA BAGI HASIL) dari BPKPD Provinsi Jambi; dan PROMAGEN (Produksi Mandiri Oksigen) dari RSUD Rd. Mattaher Jambi.

Gelaran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2023 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Hasil seleksi tersebut tertuang pada edaran Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Nomor B/208/PP.00.05/2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2023. Dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023, pendaftaran proposal KIPP diajukan secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Secara nasional, jumlah inovasi yang terdaftar dalam sinovik sebanyak 3.110 proposal. Namun yang diajukan (*di-submit*) ke KemenPANRB sebanyak 2.269 proposal terdiri dari kelompok umum 2.124 proposal dan kelompok khusus (undangan) 145 proposal. Sedangkan yang lolos seleksi administrasi sebanyak 1.381 proposal, terdiri dari 1.303 proposal kelompok umum dan 78 proposal kelompok khusus. Proposal inovasi yang lolos tersebut selanjutnya masuk ke tahap Penilaian Proposal yang akan dilakukan oleh Tim Evaluasi KIPP. Pada tahun 2023, Proposal yang diajukan untuk mengikuti kompetisi INovasi Pelayanan Publik, baru sampai tahap lolos seleksi administrasi

- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, Penyerapan belanja sebesar sebesar Rp. 138.558.367,- atau 98,72% dengan sisa anggaran Rp. 1.798.533,- (1,28%), sub kegiatan ini melaksanakan :

- Penerbitan Jurnal Khazanah Intelektual, Penerbitan jurnal ilmiah merupakan bagian dari proses diseminasi informasi ilmiah. Peran yang diemban jurnal ini menyebabkan dalam proses penerbitannya dibutuhkan pengelolaan yang baik. Pengelolaan suatu jurnal ilmiah akan mempengaruhi kualitas jurnal baik dari sisi penampilan hingga substansinya.

Jurnal Khazanah Intelektual sebagai media Balitbangda Provinsi Jambi memuat artikel/karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian dan/atau tinjauan kepustakaan dimana ruang lingkup dan fokusnya pada bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Politik, Ekonomi, Kesehatan, Pertanian, Keuangan, dan Lingkungan. yang dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan dan rekomendasi.

Khazanah Intelektual terbit 3 Kali dalam 1 Tahun (April, Agustus, Desember) Khazanah Intelektual telah terdaftar pada portal Garuda- Ristekbrin, dan terindeks pada Sistem CrossRef sehingga semua artikel akan memperoleh Digital Object Identifier (DOI) number.

Pada Volume Tujuh Edisi Pertama Tahun 2023 memuat enam artikel dengan judul :

1. Analisis Usaha ternak Sapi pada Kelompok Tani Besarangdi Desa Natai Sedawak Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah ;
Penulis : Ida Ketut Mudhita, Alam Sumiati, M.Rubiansyah dan Musnaini
2. Acceptance Model (TAM) terhadap Penggunaan Google Classroom pada Mahasiswa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
Penulis : Alifatuzzahro
3. Problematika Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka;
Penulis : Budi Teguh H, Sugiono, Sumiati dan Agung Wibowo
4. Penanganan Daerah Tertinggal di Indonesia;
Penulis : Tri Noor Aziza dan Desak Widhiastuti S
5. Transformasi Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan Mediasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
Penulis : Asrini, Amri Amir, Sri Rahayu dan Achmad Hizazi

Pada Volume Tujuh Edisi Kedua Tahun 2023 memuat enam artikel dengan judul :

1. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Bus Trans Siginjai di Provinsi Jambi;
Penulis : Vinni Aprilianti dan Asti Harken
2. Analisis Rapor Pendidikan sebagai Dasar Penyusunan Anggaran Program Berbasis Data;
Penulis : M.Asis Syamsuddin dan Budi Teguh H
3. Analisis Kelengkapan Administrasi, Farmasetik dan Klinis pada Resep di Puskesmas X Kota Sungai Penuh, Jambi;
Penulis : Suharwinda, Aisa Dinda M, Siti Hamidatul A
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia : Potensi dan Kebijakan Pemerintah untuk Dukungan Produk Bahan Alam dengan Daya Anti Bakteri;
Penulis : Lili A, Indri M, Suryani dan Rizky Yulion
5. Etnofarmasi pada Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Pemayongan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
Penulis : Santi P, Ara O, Deny S, Siti Hamidatul A, Lili A, Rizky YP, Barmi H, Rahmadevi, Yuni A, Desi S, Lia A
6. Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi;
Penulis : Agus Topo Subekti

Pada Volume Tujuh Edisi Ketiga Tahun 2023 memuat enam artikel dengan judul :

1. Strategi Pengembangan Instalasi Rawat Inap dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi Kasus pada Rumah Sakit Hermina Pasteur);
Penulis : Jetendra dan Neneng Yanti Andriani
2. Dampak Digitalisasi terhadap UMKM di Kota Jambi : Studi Deskriptif Kualitatif tentang Persepsi para Pakar dan Pelaku Usaha UMKM;
Penulis : Suroto
3. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Muslim tentang Zakat sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak terhadap Keputusan untuk Pelaporan Zakat di KPP Pratama Bengkalis pada Masa Pajak Tahun 2018-2020;
Penulis : Cindy Mei S, Dama Mustika
4. Analisa Perencanaan Bangunan Gedung Hijau Kelas 1A di Kota Jambi Menggunakan Pendekatan Partai Least Square (PLS);
Penulis : Hendi M, Didik Y, Abdul M
5. Analisis Kinerja Ekonomi Daerah Hasil Pemekaran (Studi Komparatif Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, Solok Selatan);
Penulis : Rohiyah dan Weni L

6. Perilaku Zero Waste dan Dampaknya Pada Keberlanjutan Lingkungan di Indonesia;

Penulis : Nur Pratiwi

- Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan, Fasilitas diseminasi merupakan salah satu kegiatan pendukung kelitbangan pada Balitbangda Provinsi Jambi berdasarkan pasal 8 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang inovasi dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan produk terbaru yang sudah diteliti, dikaji dan direkayasa oleh para pakar/praktisi sehingga menghasilkan informasi yang mudah dipublikasikan dan diterapkan serta ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan ini dilakukan dengan cara melalui pertemuan tatap muka langsung dengan audiens/peserta diseminasi dengan menghadirkan narasumber sesuai tema yang disampaikan.

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan secara tatap muka dengan pemangku kepentingan dengan rincian sebagai berikut :

- Sidang Tim Pengendali Mutu I dan II yang merupakan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 4 (empat) kali Sidang TPM.
- Focus Group Discussion yang merupakan yang merupakan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 2 (dua) kali FGD.
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan yang merupakan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 2 (dua) kali diseminasi, yaitu :
 1. Sosialisasi dan diseminasi tentang Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi dilaksanakan bekerja sama dengan Balitbangda dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tanggal 18 Oktober 2023 bertempat di Ruang Aula Balitbangda Provinsi Jambi. Narasumber adalah Rifani Bhakti Natari, S.E, Apt.PhD (Fungsional Peneliti Balitbangda) dan Dr.Muldiasman, SKM, MKM (Staf Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jambi); dan
 2. Sosialisasi dan diseminasi tentang Analisis Keberlanjutan Kinerja UMKM dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jambi, dilaksanakan bekerja sama dengan Balitbangda dan Universitas Jambi pada tanggal 18 Oktober 2023 bertempat di Ruang Aula Balitbangda Provinsi Jambi. Narasumber adalah Dr.Susi Desmaryani, S.E. M.M (Fungsional Peneliti Balitbangda) dan Prof. Dr. Johannes, S.E, M.Si (Guru Besar Universitas Jambi).

- Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Jumlah anggaran sebesar Rp. 74.280.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.905.497,- (99,50%).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Objek perlindungan hukum yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Kegiatan fasilitasi HKI bertujuan untuk:

- Mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan inovasi kekayaan intelektual masyarakat Provinsi Jambi;
- Mengembangkan masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi;
- Memberikan kepastian hukum atas kekayaan intelektual yang dihasilkan pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi Jambi;
- Menyelamatkan aset kekayaan intelektual milik Provinsi Jambi agar tidak di klaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
- Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen KI yang terbuka bagi masyarakat;
- Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan tindakan peniruan kekayaan intelektual karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Fasilitasi HKI Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023

NO	WILAYAH PROV/KAB/K OTA	PEMOHON	JENIS KI	NAMA PRODUK/ BARANG KI	TH.	KET.
1	Kab. Tanjung Jabung Barat	Ahmad Daud	Hak Cipta	Motif Batik Biji Kopi TJB	2023	Bersertifikat
2	Kab. Tanjung Jabung Barat	Dewi Rakhmawati	Hak Cipta	Motif Batik Sampan Layar	2023	Bersertifikat
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	Hj. Fadhilah	Hak Cipta	Motif Batik Pisang Tanduk	2023	Bersertifikat

4	Kab. Tanjung Jabung Barat	Hj. Siti Azizah, SH	Hak Cipta	Motif Batik Aliran Sungai Pengabuan	2023	Bersertifikat
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	Nurhasanah	Hak Cipta	Motif Batik Bakau	2023	Bersertifikat
6	Kab. Muaro Jambi	Indra Kusuma Atmaja	Merek	KISA-SIP	2023	Sudah Terdaftar
7	Kota Jambi	Deny Moroyati	Merek	D'moroy	2023	Sudah Terdaftar
8	Kab. Muaro Jambi	Qomariyah	Merek	Pinea Eco Paper Bag	2023	Sudah Terdaftar
9	Kab. Tanjung Jabung Barat	MPIG Pinang Betara Tanjab Barat Jambi	Indikasi Geografis	Pinang Betara Jambi	2023	Pemeriksaan formalitas
10	Kab Muaro Jambi	MPIG Nanas Tangkit Baru Jambi	Indikasi Geografis	Nanas Tangkit Baru Jambi	2023	Bersertifikat

**Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2023**

No	Program / Kegiatan	Jumlah DPA			Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
		APBD Murni Rp.	APBD Perubahan Rp.	Jumlah Total Rp.				
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAMBI								
1. Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		390.710.664	266.950.664	266.950.664	262.915.506	98,49	100,00	4.035.158
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	289.998.864	184.247.050	184.247.050	183.832.268	99,77	100,00	414.782
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.000.000	9.230.000	9.230.000	8.877.171	96,18	100,00	352.829
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10.993.500	5.093.500	5.093.500	4.638.028	91,06	100,00	455.472
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.718.300	68.380.114	68.380.114	65.568.039	95,89	100,00	2.812.075
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.932.379.021	6.682.379.020	6.682.379.020	6.631.614.731	99,24	100,00	50.764.289
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.932.379.021	6.682.379.020	6.682.379.020	6.631.614.731	99,24	100,00	50.764.289
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		152.261.000	69.750.000	69.750.000	68.228.600	97,82	100,00	1.521.400
1	Pengadaan Pakian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	39.000.000	39.000.000	39.000.000	38.628.000	99,05	100,00	372.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	113.261.000	30.750.000	30.750.000	29.600.600	96,26	100,00	1.149.400
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		553.858.762	530.330.185	530.330.185	529.910.180	99,92	100,00	420.005
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.851.550	10.851.550	10.851.550	10.851.550	100,00	100,00	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.933.212	145.933.212	145.933.212	145.706.372	99,84	100,00	226.840
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.314.000	26.314.000	26.314.000	26.138.600	99,33	100,00	175.400
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.160.000	40.007.000	40.007.000	39.998.343	99,98	100,00	8.657
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.600.000	307.224.423	307.224.423	307.215.315	100,00	100,00	9.108

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			21.170.929	18.110.271	18.110.271	18.004.950	99,42	100,00	105.321
1	Pengadaan Mebel	3.060.658	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18110271	18110271	18.110.271	18.004.950	18.004.950	99,42	100,00	105.321
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			412.515.585	405.715.585	405.715.585	380.929.060	93,89	100,00	24.786.525
1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	37.369.600	37.369.600	37.369.600	37.349.776	37.349.776	99,95	100,00	19.824
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	175.145.930	175.145.930	175.145.930	150.472.230	150.472.230	85,91	100,00	24.673.700
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.055	193.200.055	193.200.055	193.107.054	193.107.054	99,95	100,00	93.001
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			546.388.800	546.388.800	546.388.800	522.998.488	95,72	100,00	23.390.312
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	408.248.800	408.248.800	408.248.800	389.116.528	389.116.528	95,31	100,00	19.132.272
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.140.000	108.140.000	108.140.000	103.882.000	103.882.000	96,06	100,00	4.258.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	29.999.960	29.999.960	100,00	100,00	40
II. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan			310.206.358	310.206.358	310.206.358	309.986.146	99,93	100,00	220.212
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	310.206.358	310.206.358	310.206.358	309.986.146	309.986.146	99,93	100,00	220.212
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			104.950.000	100.630.000	100.630.000	100.086.317	99,46	100,00	543.683
1	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	104.950.000	100.630.000	100.630.000	100.086.317	100.086.317	99,46	100,00	543.683
3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			152.482.250	142.882.250	142.882.250	142.527.562	99,75	99,75	354.688
1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	152.482.250	142.882.250	142.882.250	142.527.562	142.527.562	99,75	100,00	354.688
4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi			790.874.984	677.083.220	677.083.220	673.136.376	99,42	100,00	3.946.844
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	97.929.264	55.737.500	55.737.500	55.640.680	55.640.680	99,83	100,00	96.820
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	241.044.000	207.484.000	207.484.000	206.711.946	206.711.946	99,63	100,00	772.054
3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	217.224.820	199.224.820	199.224.820	198.319.886	198.319.886	99,55	100,00	904.934

4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	144.676.900	140.356.900	140.356.900	138.558.367	98,72	100,00	1.798.533
5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	90.000.000	74.280.000	74.280.000	73.905.497	99,50	100,00	374.503
TOTAL		10.367.798.353	9.750.426.353	9.750.426.353	9.640.337.916	98,87	100,00	110.088.437

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	70 (BB)	66,35 (B)	94,79%	8.519.624.525,-	8.414.601.515,-	98,77
2.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	65%	100%	153,85%	1.230.801.828,-	1225.736.401,-	99,42
Belanja Oprasional						9.732.316.082,-	9.622.332.996,-	98,87
Belanja Modal						18.110.271,-	18.004.950,-	99,42
Total Belanja						9.750.426.353,-	9.640.337.916,-	98,87

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

3.5. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.11. Analisis Efisiensi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
			Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)		
1.	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	70 (BB)	66,35 (B)	94,79%	98,77	1,23
2.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	65%	100%	153,85%	99,42	0,58
TOTAL						99,095	0,905

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2023

Berdasarkan data yang diuraikan pada Tabel 3.11 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja atas sasaran strategis Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun serapan anggaran Tahun 2023 sebesar 96,095% atau terdapat efisiensi sebesar 0,905%. Efisiensi dimaksud merupakan penghematan atas penggunaan sarana dan prasana pada setiap kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Bab 4 berisi :

4.1. *Kesimpulan*

4.2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi”, dengan indikator Nilai AKIP, realisasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan, dari nilai AKIP BB tahun 2022 menjadi B tahun 2023. Hal ini kurangnya koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jambi selaku evaluator dokumen SAKIP.
2. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan”, dengan indikator Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder*, realisasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 153,85%.
3. Realisasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan efisiensi anggaran sebesar 0,905%
4. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti waktu pelaksanaan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi serta komunikasi yang intens dengan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terkait Dokumen SAKIP.
2. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dengan terus mengupdate tema/topik permasalahan yang dihadapi Provinsi Jambi yang lagi tren.

3. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Demikian LKjIP Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2023 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 2023
Kepala Badan,



Ir. H. SRI ARGUNAINI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660722 199303 2 004

L A M P I R A N

Lampiran 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. SRI ARGUNAINI, M.Si.**

Jabatan : **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.**

Jabatan : **Gubernur Jambi**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Jambi, Maret 2023

Pihak Pertama,

Ir. SRI ARGUNAINI, M.Si

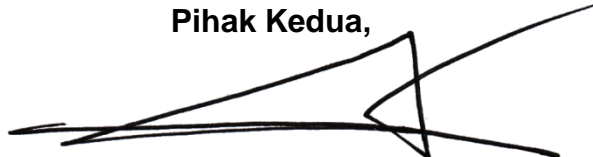
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	BB Predikat
2.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	65%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 9.009.284.761	APBD
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.358.513.592	APBD

Pihak Kedua,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos, M.H.

Pihak Pertama,



Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 004

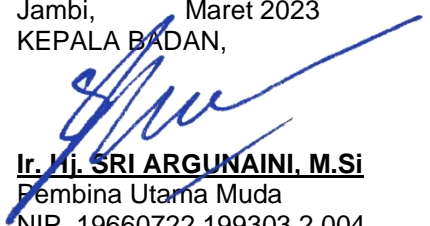
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI**

OPD	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Dasar	: 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi 2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Tugas	: Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Fungsi	: 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di Pemerintahan Provinsi; 2. penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Provinsi; 3. pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Pemerintahan Provinsi; 4. pembinaan dan fasillitasi kelitbangan kepada Perangkat Daerah pelaksana kelitbangan kab/kota; 5. pelaksanaan fasilitasi, promosi dan evaluasi inovasi daerah; 6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan di provinsi; 7. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan lingkup Pemerintah Provinsi; 8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Balitbangda; 9. memberikan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitiannya oleh instansi yang berwenang; 10. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Warga Negara Asing di daerah; 11. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi;dan 12. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Indikator Kinerja Utama :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Nilai BB	Balitbangda Provinsi Jambi	Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 (Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang sudah diaplikasikan) / (Jumlah Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang dihasilkan) X 100% n-1	Balitbangda Provinsi Jambi	Laporan Akhir Kegiatan

Jambi, Maret 2023
KEPALA BADAN,


Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660722 199303 2 004

Lampiran 3

Penghargaan yang diraih Balitbangda Tahun 2023

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi telah berhasil mendaftarkan 5 hak cipta motif batik, 3 merek UMKM, dan 2 kekayaan intelektual komunal serta memfasilitasi pendaftaran dan penulisan dokumen deskripsi Indikasi Geografis Pinang Betara dan Nanas Tangkit Baru Jambi. Selain itu, Balitbangda Provinsi Jambi juga mendapatkan piagam penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM karena telah berperan aktif dalam membangun dan melindungi serta mendukung program kekayaan intelektual di Provinsi Jambi.

Sertifikat Indikasi Geografis Nanas Tangkit Baru Jambi

	
REPUBLIK INDONESIA	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS	
<p>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, memberikan hak Indikasi Geografis kepada:</p>	
Nama dan alamat Pemilik Indikasi Geografis	: Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Nanas Tangkit Baru Jambi Jl. Syekh Muh. Said I RT.03/02 No.38 Desa Tangkit Baru, Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi, 36363
Untuk Indikasi Geografis dengan Nama	: Nanas Tangkit Baru Jambi
Nama Produk	: Buah Nanas Segar
Tanggal Penerimaan	: 12 Desember 2022
Nomor Pendaftaran	: ID G 000000137
Tanggal Pendaftaran	: 10 Oktober 2023
<p>Pelindungan Hak Indikasi Geografis tersebut diberikan selama ciri dan kualitas tertentu yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi Geografis dilampiri dengan Dokumen Deskripsi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.</p>	
	<p>a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS</p>  
<p>Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum. NIP. 197501132001121001</p>	

INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA

ID G 000000137

DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Tanggal Pengumuman:
12 Desember 2022 – 12 Februari 2023

Nomor Permohonan	: E-IG.20.2021.000013	Nama dan Alamat Pemilik Indikasi Geografis:
Tanggal Pengajuan	: 15 November 2021	Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
Tanggal Penerimaan	: 12 Desember 2022	(MPIG) Nanas Tangkit Baru Jambi
Nama Negara Asal dan Tanggal Pendaftaran	: Indonesia, 10 Oktober 2023	Jl. Syekh Muh. Said I RT.03/02 No.6
Nama Produk	: Buah Nanas Segar	Desa Tangkit Baru, Kec. Sungai Gelam
		Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi 36363
		Nama dan Alamat Konsultan HKI:
		-
		Tim Ahli : 1. Dr. Ir. Endhay Kusnendar, M.Sc
		2. Ir. Sri Esti Haryanti. MM

Label Indikasi Geografis:



Abstrak:

Nanas Tangkit Baru Jambi merupakan tanaman buah yang citarasanya manis keasam-asaman. Rasa dan tekstur nanas Tangkit Baru Jambi dipengaruhi oleh tanah gambut yang spesifik dari Desa Tangkit Baru. Tanaman nanas telah dibudidayakan dan dikembangkan oleh masyarakat Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 1970. Kekhasan Nanas Tangkit Baru Jambi, selain memiliki rasa yang manis juga tersedia sepanjang tahun. Sejak tahun 2000, Nanas Tangkit Baru telah ditetapkan sebagai varietas unggul nasional dan termasuk nanas golongan *Queen* dengan kualitas terbaik. Nanas Tangkit telah mendapat pengakuan sebagai komoditi berkualitas baik, maka selain sebagai potensi unggulan, juga dapat dikategorikan sebagai salah satu potensi Indikasi Geografis (IG) yang perlu mendapat perlindungan dari Pemerintah. Nanas Tangkit Baru Jambi memiliki karakteristik yaitu bentuk buah bulat lonjong hingga hampir bulat, berwarna kuning saat sudah matang, memiliki rasa manis keasaman, dengan tekstur halus dan sedikit berserat, sehingga sangat segar untuk dikonsumsi. Hasil uji untuk nanas yang sudah kuning menunjukkan : Vitamin C: 17,45 mg/100g, Total Asam : 1,60 %, Kadar Gula : 18,55%, Karbohidrat Total : 19,19 %, dan Kadar Air : 81,14% serta beberapa kandungan nutrisi lain. Tanaman ini dapat tumbuh sempurna di dataran rendah dengan lahan gambut dangkal pada ketinggian \pm 10 meter dari permukaan laut dengan pH rata-rata 3,5 – 4. Mengingat kondisi geografis Desa Tangkit Baru yang sebagian besar berupa lahan gambut, sehingga hampir semua petani di Desa Tangkit Baru menanam nanas dan menjadi pemasok komoditas nanas terbesar di Provinsi Jambi.

ID G 000000137



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : HKI-18.UM.03.07 TAHUN 2023

Diberikan kepada :

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PROVINSI JAMBI

Yang telah :

**Berperan Aktif dalam Membangun dan Melindungi serta Mendukung
Program Kekayaan Intelektual di Provinsi Jambi**

Jambi, 14 September 2023

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,



Min Usihen
Min Usihen

NIP 196903091994032001

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan

**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

**bangga
melayani
bangsa**

Sertifikat Hak Cipta Motif Batik

	
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202352201, 6 Juli 2023
Pencipta	
Nama	: Ahmad Daud
Alamat	: Jl. Panglima Ujung Kelurahan Tungkal III, Tanjung Jabung Barat, Jambi, 36557
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Ahmad Daud
Alamat	: Jl. Panglima Ujung Kelurahan Tungkal III, Tanjung Jabung Barat, JAMBI 36557
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Seni Batik
Judul Ciptaan	: Motif Batik Biji Kopi TJB
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 6 Juli 2023, di Jambi
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000485136
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
	
	Anggoro Dasananto NIP. 196412081991031002
Disclaimer: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.	



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202352202, 6 Juli 2023
Pencipta	
Nama	: Dewi Rakhmawati
Alamat	: Jl. Sriwijaya RT. 05 Kelurahan Patunas, Tanjung Jabung Barat, Jambi, 36513
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Dewi Rakhmawati
Alamat	: Jl. Sriwijaya RT. 05 Kelurahan Patunas, Tanjung Jabung Barat, JAMBI 36513
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Seni Batik
Judul Ciptaan	: Motif Batik Sampan Layar
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 6 Juli 2023, di Jambi
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000485137

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202352203, 6 Juli 2023
Pencipta	
Nama	: Hj. Fadhilah
Alamat	: Jl. BTN Selempong Merah RT. 007 Kelurahan Sungai Nibung, Tanjung Jabung Barat, Jambi, 36511
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Hj. Fadhilah
Alamat	: Jl. BTN Selempong Merah RT. 007 Kelurahan Sungai Nibung, Tanjung Jabung Barat, JAMBI 36511
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Seni Batik
Judul Ciptaan	: Motif Batik Pisang Tanduk
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 6 Juli 2023, di Jambi
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000485138

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal permohonan memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202352204, 6 Juli 2023

Pencipta

Nama : **Hj. Siti Azizah, SH**
Alamat : Jl. KH Dewantara RT. 011 Kelurahan Patunas, Tanjung Jabung Barat,
Jambi, 36513
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Hj. Siti Azizah, SH**
Alamat : Jl. KH Dewantara RT. 011 Kelurahan Patunas, Tanjung Jabung Barat,
JAMBI 36513
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Seni Batik**
Judul Ciptaan : **Motif Batik Aliran Sungai Pengabuan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 6 Juli 2023, di Jambi
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000485139

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

	
REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202352205, 6 Juli 2023
Pencipta	
Nama	: Nurhasanah
Alamat	: RT.01/08 Pangkal Babu Parit 14 Dusun Bahagia, Tanjung Jabung Barat, Jambi, 36557
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Nurhasanah
Alamat	: RT.01/08 Pangkal Babu Parit 14 Dusun Bahagia, Tanjung Jabung Barat, JAMBI 36557
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Seni Batik
Judul Ciptaan	: Motif Batik Bakau
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 6 Juli 2023, di Jambi
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000485140
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Direktur Hak Cipta dan Desain Industri  Anggoro Dasananto NIP. 196412081991031002
Disclaimer: Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.	

Permohonan Pendaftaran Merek
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA
APPLICATION FORM OF INDONESIAN TRADEMARK REGISTRATION

Data Permohonan (Application)			
Nomor Transaksi <i>Number of Transaction</i>	: IPT2023099631	Asal Permohonan <i>Office of Origin</i>	: Online Filing
Nomor Permohonan <i>Number of Application</i>	: DID2023047065	Tipe Permohonan <i>Type of Application</i>	: Merek Dagang
Tanggal Penerimaan <i>Receipt Date</i>	: 2023-06-13 12:25:14	Jenis Permohonan <i>Sub Type of Application</i>	: Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Data Merek (Description of Mark)	
Tipe Merek <i>Type of Mark</i>	: Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek <i>Name of Mark</i>	: KISA-SIP
Deskripsi <i>Description</i>	: Merek yang mengartikan "king induk super aktif, super induk premium" pupuk organik padat dan cair.
Warna <i>Colors</i>	: Cokelat muda dan cokelat tua
Terjemahan <i>Translation</i>	: Tidak Ada Terjemahan
Transliterasi/Pengucapan <i>Transliteration</i>	:
Disclaimers <i>Disclaimers</i>	:



Data Pemohon (Applicant)

Signed by IPROLINE Merek
on 2023/06/13 12:25:17

Nama <i>Name</i>	: PT. KUSUMA LESTARI AGRO		
Jenis Pemohon <i>Owner Type</i>	: Badan Hukum		
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	: Indonesia		
Alamat <i>Address</i>	: Perumahan Mutiara Bagan Pete RT. 03 Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo No. 43 Jambi		
Kabupaten/Kota <i>City</i>	: Kota Jambi	Kode Pos <i>Zip Code</i>	: 36129
Provinsi <i>Province</i>	: Jambi	Negara <i>Country</i>	: Indonesia
Telepon <i>Phone</i>	: 085281893998		
Surel <i>Email</i>	: indrakusumaatmaja64@gmail.com		

Alamat Surat Menyurat (<i>Mailing Address</i>)			
Alamat <i>Address</i>	: Desa Pematang Gadung Kecamatan Mersam Rt.001		
Kabupaten/Kota <i>City</i>	: Kabupaten Batanghari	Kode Pos <i>Zip Code</i>	: 36654
Provinsi <i>Province</i>	: Jambi	Negara <i>Country</i>	: Indonesia
Telp/Fax <i>Phone</i>	: 085281893998		
Surel <i>Email</i>	: indrakusumaatmaja64@gmail.com		

Data Kuasa (<i>Representative/IP Consultant</i>)	
Nama Konsultan <i>Consultant Name</i>	: No Konsultan <i>Number of Consultant</i>
Nama Kantor <i>Office Name</i>	:
Alamat <i>Address</i>	:
Telp/Fax <i>Phone</i>	:
Surel <i>Email</i>	:

Data Prioritas (<i>Priority Data</i>)			
No	Tanggal Prioritas (<i>Priority Date</i>)	Negara / Kantor Merek (<i>Priority Country</i>)	No Prioritas (<i>Number of Priority</i>)

Data Kelas (Class)	
Kelas (Class)	Uraian Barang dan/atau Jasa (Description of Goods/Services)
1	pupuk; pupuk hayati; pupuk organik <i>fertilizers; biofertilizers; organic fertilizers</i>

Dokumen Lampiran (Attachment)	
Surat Pernyataan UKM Bermaterai Surat Rekomendasi UKM Binaan Atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (ASLI) Tanda Tangan Digital Pemohon	

Identitas pemohon jika pemohon lebih dari satu pihak (Additional Applicant)	
No	Nama Pemohon Tambahan

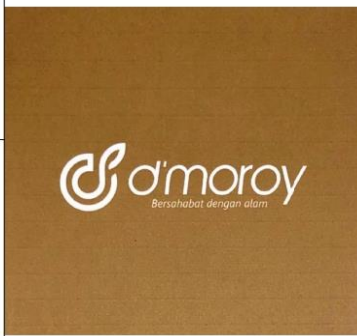
Gambar Merek Tambahan (Additional Mark)	
No	Gambar Merek Tambahan

Tanda Tangan Pemohon / Kuasa (Applicant / Representative Signature)	
 <p>(PT. KUSUMA LESTARI AGRO)</p>	
Tempat dan Tanggal (Place and Date) : Jakarta, 13-06-2023	



FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA
APPLICATION FORM OF INDONESIAN TRADEMARK REGISTRATION

Data Permohonan (Application)			
Nomor Transaksi <i>Number of Transaction</i>	: IPT2023155950	Asal Permohonan <i>Office of Origin</i>	: Online Filing
Nomor Permohonan <i>Number of Application</i>	: DID2023072719	Tipe Permohonan <i>Type of Application</i>	: Merek Dagang
Tanggal Penerimaan <i>Receipt Date</i>	: 2023-08-28 11:12:57	Jenis Permohonan <i>Sub Type of Application</i>	: Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Data Merek (Description of Mark)		
Tipe Merek Type of Mark	: Merek Kata dan Lukisan	Etiket Gambar/Label Merek Image of Mark
Nama Merek Name of Mark	: d'moroy	
Deskripsi Description	: Tulisan d'moroy didepannya ada gambar daun yang melambangkan kedekatan dengan alam, selain bahan baku kerajinan anyaman berbahan dari daun. Semua huruf kecil dan miring ke kanan melambangkan bahwa d'moroy akan selalu membumi dan bekerja dalam kebaikan.	
Warna Colors	: Kuning mustard dan putih	
Terjemahan Translation	: Tidak Ada Terjemahan	
Transliterasi/Pengucapan Transliteration	:	
Disclaimers Disclaimers	:	

Data Pemohon (Applicant)

Signed by IPROLINE Merek
on 2023/08/28 11:13:00

Nama <i>Name</i>	: Deny Moroyati, S.Pd		
Jenis Pemohon <i>Owner Type</i>	: Perorangan		
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	: Indonesia		
Alamat <i>Address</i>	: Jl. Adityawarman Gg. Pacitan No. 38 RT. 14 Sukorejo, Thehok		
Kabupaten/Kota <i>City</i>	: Kota Jambi	Kode Pos <i>Zip Code</i>	: 36138
Provinsi <i>Province</i>	: Jambi	Negara <i>Country</i>	: Indonesia
Telepon <i>Phone</i>	: 081368356668		
Surel <i>Email</i>	: dmoroykreasialamnusantara@gmail.com		

Alamat Surat Menyurat (<i>Mailing Address</i>)			
Alamat <i>Address</i>	:		
Kabupaten/Kota <i>City</i>	:	Kode Pos <i>Zip Code</i>	:
Provinsi <i>Province</i>	:	Negara <i>Country</i>	:
Telp/Fax <i>Phone</i>	:		
Surel <i>Email</i>	:		

Data Kuasa (<i>Representative/IP Consultant</i>)	
Nama Konsultan <i>Consultant Name</i>	No Konsultan <i>Number of Consultant</i>
Nama Kantor <i>Office Name</i>	:
Alamat <i>Address</i>	:
Telp/Fax <i>Phone</i>	:
Surel <i>Email</i>	:

Data Prioritas (<i>Priority Data</i>)			
No	Tanggal Prioritas (<i>Priority Date</i>)	Negara / Kantor Merek (<i>Priority Country</i>)	No Prioritas (<i>Number of Priority</i>)

Data Kelas (Class)	
Kelas (Class)	Uraian Barang dan/atau Jasa (Description of Goods/Services)
25	Hijab; Mukena; Pakaian wanita; celana santai; kaos oblong; pakaian pria; pakaian santai; penutup kepala; topi mode -; <i>Mukena; ladies' wear; lounge pants; T-shirts; men's wear; casual wear; headgear; fashion hats</i>

Dokumen Lampiran (Attachment)	
Surat Pernyataan UKM Bermaterai Surat Rekomendasi UKM Binaan Atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (ASLI) Tanda Tangan Digital Pemohon	

Identitas pemohon jika pemohon lebih dari satu pihak (Additional Applicant)	
No	Nama Pemohon Tambahan

Gambar Merek Tambahan (Additional Mark)	
No	Gambar Merek Tambahan

Tanda Tangan Pemohon / Kuasa (Applicant / Representative Signature)	
	
(Deny Moroyati, S.Pd)	
Tempat dan Tanggal (Place and Date) : Jakarta, 28-08-2023	



FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA
APPLICATION FORM OF INDONESIAN TRADEMARK REGISTRATION

Data Permohonan (Application)	
Nomor Transaksi <i>Number of Transaction</i>	: IPT2023228132
Nomor Permohonan <i>Number of Application</i>	: DID2023108847
Tanggal Penerimaan <i>Receipt Date</i>	: 2023-11-21 13:45:19
Asal Permohonan <i>Office of Origin</i>	: Online Filing
Tipe Permohonan <i>Type of Application</i>	: Merek Dagang
Jenis Permohonan <i>Sub Type of Application</i>	: Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Data Merek (Description of Mark)	
Tipe Merek <i>Type of Mark</i>	: Merek Kata dan Lukisan
Nama Merek <i>Name of Mark</i>	: Pinea Eco Paper Bag
Deskripsi <i>Description</i>	
Warna <i>Colors</i>	: Kuning, orange, hijau tua dan hitam
Terjemahan <i>Translation</i>	: Tidak Ada Terjemahan
Transliterasi/Pengucapan <i>Transliteration</i>	
Disclaimers <i>Disclaimers</i>	



Data Pemohon (Applicant)

Signed by IPROLINE Merek
on 2023/11/21 13:45:23

Nama <i>Name</i>	: QOMARIYAH		
Jenis Pemohon <i>Owner Type</i>	: Perorangan		
Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	: Indonesia		
Alamat <i>Address</i>	: Simpang Padang RT. 002 RW. 001 Kel/Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo		
Kabupaten/Kota <i>City</i>	: Kabupaten Muaro Jambi	Kode Pos <i>Zip Code</i>	: 36382
Provinsi <i>Province</i>	: Jambi	Negara <i>Country</i>	: Indonesia
Telepon <i>Phone</i>	: 082249009953		
Surel <i>Email</i>	: qomariyahza08@gmail.com		

Alamat Surat Menyurat (<i>Mailing Address</i>)			
Alamat <i>Address</i>	:		
Kabupaten/Kota <i>City</i>	:	Kode Pos <i>Zip Code</i>	:
Provinsi <i>Province</i>	:	Negara <i>Country</i>	:
Telp/Fax <i>Phone</i>	:		
Surel <i>Email</i>	:		

Data Kuasa (<i>Representative/IP Consultant</i>)	
Nama Konsultan <i>Consultant Name</i>	No Konsultan <i>Number of Consultant</i>
Nama Kantor <i>Office Name</i>	:
Alamat <i>Address</i>	:
Telp/Fax <i>Phone</i>	:
Surel <i>Email</i>	:

Data Prioritas (<i>Priority Data</i>)			
No	Tanggal Prioritas (<i>Priority Date</i>)	Negara / Kantor Merek (<i>Priority Country</i>)	No Prioritas (<i>Number of Priority</i>)

Data Kelas (Class)	
Kelas (Class)	Uraian Barang dan/atau Jasa (Description of Goods/Services)
16	<p>Bahan kerajinan kertas; Kertas kerajinan; kantong belanja dari kertas; kantong kertas; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; karya seni kertas</p> <p><i>Paper crafts materials; Craft paper; shopping bags of paper; paper bags; bags of paper for packaging; paper bags for household purposes; works of art of paper</i></p>

Dokumen Lampiran (Attachment)
<p>Dokumen Pendukung</p> <p>Surat Pernyataan UKM Bermaterai</p> <p>Surat Rekomendasi UKM Binaan Atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (ASLI)</p> <p>Tanda Tangan Digital Pemohon</p>

Identitas pemohon jika pemohon lebih dari satu pihak (Additional Applicant)	
No	Nama Pemohon Tambahan

Gambar Merek Tambahan (Additional Mark)	
No	Gambar Merek Tambahan

Tanda Tangan Pemohon / Kuasa (Applicant / Representative Signature)



(QOMARIYAH)

Tempat dan Tanggal (Place and Date) : Jakarta, 21-11-2023



DOKUMENTASI

Pengumpulan Data Dokumen Deskripsi IG Nanas Tangkit Baru Jambi dan Pinang Betara Jambi





Bantuan teknis tim ahli IG DJKI, evaluasi kesiapan pemeriksaan substantif, dan pendaftaran permohonan Indikasi Geografis Pinang Betara Jambi



Penerimaan penghargaan dari DJKI Kemenkumham RI dan rapat persiapan pemeriksaan substantif IG Nanas Tangkit Baru Jambi



2. Penandatanganan Komitmen antara Kementerian PANRB dan Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 14 Maret 2023 tentang pembentukan HUB Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (HUB JIPP) Provinsi Jambi. Hub JIPP merupakan platform yang digunakan untuk pembinaan inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya transformasi pelayanan, sebagaimana diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan diadakannya Hub JIPP ini, Kementerian PANRB akan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Provinsi yang ditetapkan sebagai Hub JIPP Daerah

3. PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

Melaksanakan amanat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota. Hasil Pengukuran IPKD untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelompok Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
									9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Ketersediaan Hasil Kajian Kelitbangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi untuk dimanfaatkan sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PRIOVINSI	Nilai AKIP		BB Predikat	BB Predikat	12.084.630.000	BB Predikat	12.295.500.000	BB Predikat	13.168.750.000	BB Predikat	14.022.000.000	BB Predikat	14.345.250.000	BB Predikat	65.916.130.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	Balitbangda Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota dan Instansi Terkait	100%	100%	525.000.000	100%	590.000.000	100%	660.000.000	100%	730.000.000	100%	800.000.000	100%	3.305.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	JAMBI
				5.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Balitbangda Provinsi Jambi (Dokumen)		3	7	325.000.000	7	340.000.000	7	360.000.000	7	380.000.000	7	400.000.000	35	1.805.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	10	200.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)		1	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	10	200.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	10	200.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	10	200.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		7	8	90.000.000	8	95.000.000	8	100.000.000	8	105.000.000	8	110.000.000	40	500.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	5	200.000.000		
				5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbngda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	8.985.000.000	100%	9.290.000.000	100%	9.495.000.000	100%	9.700.000.000	100%	9.905.000.000	100%	47.375.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		NA	50	8.900.000.000	55	9.200.000.000	60	9.400.000.000	65	9.600.000.000	70	9.800.000.000	300	46.900.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		NA	30	85.000.000	33	90.000.000	36	95.000.000	39	100.000.000	41	105.000.000	179	475.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	76.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	95.000.000	100%	426.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	2	76.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000	2	90.000.000	2	95.000.000	10	426.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbngda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	162.250.000	100%	185.500.000	100%	208.750.000	100%	232.000.000	100%	305.250.000	100%	1.093.750.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Paket)		NA	1	42.250.000	1	45.500.000	1	48.750.000	1	52.000.000	1	55.250.000	5	243.750.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		8	12	120.000.000	14	140.000.000	16	160.000.000	20	180.000.000	25	250.000.000	87	850.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbngda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	785.000.000	100%	855.000.000	100%	925.000.000	100%	995.000.000	100%	1.065.000.000	100%	4.625.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		NA	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	5	125.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		NA	2	150.000.000	2	175.000.000	2	200.000.000	2	225.000.000	2	250.000.000	10	1.000.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		0	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	5	125.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		NA	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	5	200.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		NA	2	45.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	10	275.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		NA	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	5	100.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)		50	40	420.000.000	45	440.000.000	50	460.000.000	55	480.000.000	60	500.000.000	250	2.300.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)		NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbngda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	525.000.000	100%	130.000.000	100%	490.000.000	100%	825.000.000	100%	560.000.000	100%	2.530.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 2)		0	2	400.000.000	0	0	0	350.000.000	5	125.000.000	2	400.000.000	9	1.275.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 2)		1	1		0		1		0		1		3			
				5.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0	0	0	0	0	0	0	1	550.000.000	0	0	1	550.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		0	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	5	200.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)		0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	12	45.000.000	16	45.000.000	20	50.000.000	24	55.000.000	28	60.000.000	100	255.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	410.000.000	100%	485.000.000	100%	560.000.000	100%	635.000.000	100%	710.000.000	100%	2.800.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	60	250.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0	12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	60	1.250.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	2	220.000.000	2	240.000.000	2	260.000.000	2	280.000.000	2	300.000.000	10	1.300.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	616.380.000	100%	680.000.000	100%	745.000.000	100%	815.000.000	100%	905.000.000	100%	3.761.380.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)		23	20	305.380.000	23	310.000.000	23	315.000.000	24	320.000.000	29	350.000.000	119	1.600.380.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0	4	136.000.000	4	140.000.000	4	145.000.000	4	155.000.000	5	160.000.000	21	736.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		30	30	25.000.000	30	30.000.000	30	35.000.000	30	40.000.000	30	45.000.000	150	175.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)		1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	5	1.250.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
		Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi/ naskah akademik/ model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya		50%	60%	6.302.300.000	65%	7.548.750.000	70%	7.569.600.000	75%	7.580.070.000	80%	8.590.070.000	80%	37.590.790.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau pihak lainnya pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat	50%	60%	1.580.000.000	65%	1.855.000.000	70%	1.857.500.000	75%	1.865.000.000	80%	2.120.000.000	80%	9.277.500.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)		0	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	905.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)		0	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	905.000.000		
				5.05.02.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)		-	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	905.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)		-	8	50.000.000	8	55.000.000	8	57.500.000	8	65.000.000	8	70.000.000	40	297.500.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)		0	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)		0	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya pada Bidang Sosial dan Kependudukan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, dan Stakeholder dan Masyarakat	50%	60%	1.660.000.000	65%	1.980.000.000	70%	1.985.000.000	75%	1.980.000.000	80%	2.255.000.000	80%	9.860.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial (Dokumen)		-	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	905.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	185.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	900.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat	50%	60%	1.885.000.000	65%	2.340.000.000	70%	2.340.000.000	75%	2.340.000.000	80%	2.665.000.000	80%	11.570.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)		-	1	200.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	945.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)		-	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	905.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)		-	1	15.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	760.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)		-	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	905.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
		Meningkatnya Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk Mendukung Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	NA	60%	1.177.300.000	65%	1.373.750.000	70%	1.387.100.000	75%	1.395.070.000	80%	1.550.070.000	80%	6.883.290.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.01	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		0	2	200.000.000	2	250.000.000	1	253.000.000	1	254.500.000	1	310.000.000	7	1.267.500.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)		0	5	400.000.000	5	410.000.000	5	415.000.000	5	416.570.000	5	450.000.000	25	2.091.570.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)		0	3	250.000.000	3	289.575.000	3	290.000.000	3	291.500.000	3	300.070.000	15	1.421.145.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan (Laporan)		3	3	227.300.000	3	277.000.000	3	279.100.000	3	280.000.000	3	320.000.000	15	1.383.400.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		0	1	100.000.000	1	147.175.000	1	150.000.000	1	152.500.000	1	170.000.000	5	719.675.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					JUMLAH					18.386.930.000		19.844.250.000		20.738.350.000		21.602.070.000		22.935.320.000		103.506.920.000		